

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : 15 Tahun 2001

TAHUN : 2001

**TENTANG : Rencana Strategis Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Kencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potiet permasalahan pembangunan daerah, serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan didaerah secara terencana dan hertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimilik dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dokumen Perencanaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, disahkan oleh DPRD yang selanjutnya disebut Renstra merupakan rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan. Program dan Kegiatan Daerah.

Secara Umum Renstrada memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan potensi daerah.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan di perlukan terutama untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks yang menuntut adanya peruhahan dalam manajemem pembangunan.
2. Pemilihan kebijakan penbangunan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan.
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan pembangunan
4. Peningkatan pelayanan publik,
5. Alat fasilitasi komunikasi dan partisipasi dalam mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dalam pengambilan keputusan.
6. Acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pola Dasar (Poldas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bandung.

Dengan dernikian, pererencanaan strategis di susun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berketanjutan dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya kondisi dari potensi, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstrada

Renstrada disusun dengan tujuan untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung baik sektoral maupun lintas sector, sebagai pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

Sasaran penyusunan Renstrada adalah sebagai penjabaran dokumen induk perencanaan (Poldas), serta Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bandung yang memuat dan hanya dibatasi pada kebijakan desentralisasi sesuai dengan semangat otonomi daerah.

1.3. Kedudukan dan Fungsi Renstrada

Renstra Daerah (Renstrada) Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan dan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Pula Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bandung tahun 2001-2005 yang dituangkan kedalam rencana program dan kegiatan strategis dan taktis 5 (lima) tahunan daerah Kabupaten Bandung.
2. Sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA), dan RAPBD.
3. Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahunan melalui sumber pembiayaan APBD dengan penekanan pada program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan daerah dan Belanja daerah.
4. Sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Bandung kepada DPRD baik tahunan maupun pada akhir masa jabatan.
5. Sebagai pedoman, acuan dalam setiap kegiatan pola perilaku Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga kedudukannya mengikat kepada semua pihak baik pemerintah, DPRD maupun masyarakat Kabupaten Bandung dengan demikian Renstrada yang disusun harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta memperkirakan keadaan masa mendatang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal yaitu dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bandung menuju amanah "*Repeh Rapih kertaraharja*".

1.4. Landasan Penyusunan Renstrada

Rencana strategis daerah (Renstrada) Kabupaten Bandung dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional Sebagai landasan operasional adalah GBHN 1999 - 2004, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang - Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 - 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pamerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2005 dan Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2001-2005. Disamping itu, substansi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung juga memperhatikan Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategic Propinsi Jawa Barat.

1.5. Sistematika fienuisatt Renstrada

Sistematika Penulisan Renstrada Kabupaten Bandung disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Umum
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstrada
- 1.3. Kedudukan dan Fungsi Renstrada
- 1.4. Landasan Penyusunan Renstrada
- 1.5. Sistematika

BAB II ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

- 2.1. Kondisi Umurn
 - 2.1.1. Sosial Budaya
 - 2.1.2. Perekonomian
 - 2.1.3 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.4. Infrastruktur dan Tata Ruang
 - 2.1.5. Pemerintahan
- 2.2. Analisis SWOT
 - 2.2.1. Lingkungan Internal
 - 2.21 Lingkungan Eksternal

BAB III KERIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
- 3.3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

BAB IV CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)

- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4.2. Bidang Politik
- 4.3. Bidang Hukum
- 4.4. Bidang Keamanan dan Ketertiban
- 4.5. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- 4.6. Bidang Pendidikan

- 4.7. Bidang Kesehatan
- 4.8. Bidang Sosial Budaya
- 4.9. Bidang Ketenagakerjaan
- 4.10. Bidang Agama
- 4.11. Bidang Pembangunan
- 4.12. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
- 4.13. Bidang Ekonomi

BAB V DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

2.1 . Kondisi Umum

2.1.1. Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya adalah masyarakat yang memiliki jiwa agamis serta memegang nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan secara turun temurun. Seperti halnya masyarakat Jawa Barat, demikian pula masyarakat Kabupaten Bandung memiliki falsafah "*silih asah, silih asih, silih asuh*", yang berarti saling mengasahi. saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara sesama warga. Dengan demikian, tradisi menolong dan solidaritas antar sesama masyarakat menjadi ciri kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah pedesaan dimana interaksi antar warga masih terjadi secara intens. Tujuan kehidupan "*gemah ripah loh jinawi*, telah menjadi motto yang diidamkan masyarakat sejak dahulu, dan hingga kini diangkat menjadi visi pembangunan Kabupaten Bandung.

Walaupun demikian, pengamalan ajaran agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari belum menampakkan pengaruh yang berarti, masih terdapat fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mencerminkan belum terkelolanya pengamalan agama, khususnya di sisi zakat, demikian pula masih terdapat pelanggaran agama dan budaya, seperti adanya praktek perjudian, miras, pelacuran, pencurian, tindak kekerasan dan sebagainya, yang tidak akan terjadi apabila ajaran agama dan tradisi budaya telah diamalkan dengan baik.

Di sisi lain, pengaruh kondisi global melalui keterbukaan yang di tunjang teknologi informasi dan komunikasi, tidak selalu membawa dampak positif, terutama sisi budaya seperti pola hidup konsumtif dan materialistis, kemudian Pula hidup bebas dan pemakaian narkoba terutama di kalangan, generasi muda mulai menjadi gaya hidup yang mengancam masa depan bangsa. Kondisi keterbukaan juga mulai melunturkan nilai-nilai agama dan budaya lokal, terkikis budaya baru yang serba gemerlap di setiap media massa yang ada.

Kondisi krisis multi dimensi yang sampai sekarang belum secara baik tertanggulangi, juga menjadi pemicu semakin kompleksnya masalah yang dihadapi. Ditambah pula dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2000 berdasarkan proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) sebesar 2,74%, jauh lebih besar dari angka diseluruh Jawa Barat sebesar 1,99%, sehingga pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Bandung mencapai 4.158.173 jiwa. Kejadian PHK yang meningkat dalam kurun waktu tahun 1997 - 2000 juga menjadi faktor pendorong kompleksitas masalah akibat meningkatnya pengangguran. Sebagai gambaran, pada tahun 1996/1997 terdapat 211.270 orang penganggur, menjadi 318.132 orang pada tahun 1999.

Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak memiliki kualitas yang memadai, apalagi dikaitkan dengan kondisi global, akan menjadi beban yang berat dalam pembangunan, terutama berkaitan dengan penyediaan

kebutuhan pokok hidup seperti pangan, sandang dan papan. Disamping itu, persaingan bebas, baik dengan sesama bangsa maupun dengan pendatang asing. memerlukan kemampuan yang tinggi dalam aspek pendidikan pada umumnya, agar tidak terpinggirkan di daerah sendiri Kondisi pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung ternyata masih relatif rendah, yaitu angka RLS (Rata-rata Lama Sekolah) hanya mencapai 7 (tujuh) tahun atau rata-rata hanya setingkat sekolah dasar.

Dilihat secara makro, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Bandung masih berada pada angka 65,09 di tahun 2000 (angka proyeksi BPS), sedikit di bawah IPM Jawa Barat yaitu 65,30. Angka ini masih jauh dari angka ideal yaitu lebih dari 80 yang diupayakan untuk terus ditingkatkan, sampai tahun 2005 diharapkan akan dicapai angka IPM 75,99 yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

2.1.2. Perekonomian

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung telah menunjukkan intensitas yang meningkat dan telah terjadi berbagai perubahan dan/atau pergeseran kontribusi per sektor lapangan usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang multi dimensional sosial, ekonomi /moneter dan hukum). Kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier menunjukkan kontribusi yang makin besar, sector primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) menunjukkan kontribusi yang semakin berkurang, kecuali ketika terjadi puncak krisis ekonomi pada tahun 1998.

Program pembangunan yang telah menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat antara lain melalui indikator makro ekonomi yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi). Sebagai gambaran PDRB Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku pada tahun 1997 sebesar Rp 10,650 trilyun, tahun 1998 sebesar Rp 14,949 trillyun, tahun 1999 sebesar Rp 16,996 trilyun dan tahun 2000 sebesar Rp 19,972 trilyun, dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) masing-masing sebesar +4,93%, -19,57%, +2,97 % dan +5,13 %. Tahun 1998 terjadi puncak krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan LPE hingga minus 19,57%, sedangkan pada tahun 1999 meningkat kembali dengan kontribusi sektor primer sebesar 10,17%, sekunder sebesar 62,60 % dan sektor tersier sebesar 27,20%. Pendapatan Perkapita tahun 2000 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4.815.910 dan atas dasar harga korstan sebesar Rp. 1.655.433.

Turunnya nilai tukar rupiah sebagai akibat dampak krisis ekonomi berkepanjangan secara nasional yang terjadi sejak tahun 1998, menyebabkan terjadinya kelesuan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan menurunnya investasi yang dilakukan dunia usaha. Selain itu juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah.

2.1.3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Air

a. Sumber Air

Curah hujan yang tinggi serta adanya beberapa sungai besar dan kecil di Kabupaten Bandung, menjamin tersedianya sumber daya air yang mencukupi. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Citarum, Cikapundung dan Cisangkuy, selain dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, juga dimanfaatkan untuk pengairan. sumber air Baku PDAM, serta sumber PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air).

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya penurunan kualitas air permukaan yang terutama disebabkan oleh pencemaran, baik pencemaran oleh limbah industri maupun domestik, sehingga lambat laun, kualitas air permukaan semakin tidak layak untuk diminum tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Lebih parah lagi, pada beberapa kasus, antara lain terjadi di Kecamatan Cicalengka dan Rancaekek, air sungai yang tercemar menimbulkan gangguan kulit pada masyarakat yang memergunakannya. Dilihat secara umum pada kualitas air sungai Citarum, berdasarkan parameter oksigen terlarut, telah terjadi penurunan mulai ruas Majalaya, Sapan, Margahayu. sampai Batujajar (data Perum Jasa Tirta II tahun 1999), meskipun secara keseluruhan masih berada di bawah ambang batas, demikian pula parameter lainnya kecuali amoniak, nitrit dan koli tinja sudah melebihi ambang batas. Volume limbah terhadap air sungai pada tahun 1999 adalah sekitar 1,2 juta m³ dan industri pengolahan; industri tekstil sekitar 77.837,69 m³ industri kimia dasar sekitar 19.117,43 m³. Beban pencemaran kegiatan industri adalah BOD sekitar 656.499,94 ton/tahun; COD sekitar 870.330,90 ton/tahun; SS sekitar 639.600 ton/tahun; TDS sekitar 144,719 ton/tahun dan N sekitar 5,039,71 ton/tahun, Volume limbah Cair dari kegiatan domestic adalah 11.516,66 m³/tahun. Beban pencemaran yang timbul adalah BOD sekitar 10.885,61 ton/tahun, COD sekitar 178.926,09 ton/tahun; SS sekitar 25.242 ton/tahun; TDS sekitar 60.738,57 ton/tahun dan N sekitar 10.245.87 ton/tahun.

Disamping pencemaran air, terjadi fluktuasi air permukaan yang sangat mencolok di musim hujan dan kemarau. Hal ini terjadi akibat pengelolaan sumber daya air yang belum optimal, serta perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, sehingga pada musim penghujan sering mengakibatkan meluapnya air dari Sungai Citarum dan beberapa anak sungainya, kemudian menimbulkan banjir di beberapa daerah seperti meluapnya Sungai Cimariuk menggenangi wilayah Margahayu, Sungai Ciendog menggenangi wilayah cileunyi, Sungai Cikijing menggenangi wilayah Cicalengka, Sungai Leuwiteureup menggenangi wilayah Majalaya, Sungai Cirasea dan Sungai Jelesong menggenangi wilayah Ciparay, serta banjir di daerah Bojongsoang. Hal ini didorong oleh berkurangnya daerah-darah resapan air di hulu-hulu sungai akibat terjadinya penebangan hutan yang menyebabkan erosi yang menimbulkan pendangkalan sungai. Kondisi air bawah tanah di Kabupaten Bandung di sebagian daerah, menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan karena terjadi penurunan akuifer muka air tanah setiap tahun. Penurunan akuifer dangkal (0,05-7,35 m per tahun) terjadi di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Dayeuhkolot, Soreang, Katapang, Pameungpeuk, Banjaran, dan Rancaekek, sedangkan

penurunan akuifer dalam (0,7-8,57 m per tahun) terjadi di Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi Selatan, Dayeuhkolot dan Rancaekek. Penurunan akuifer disebabkan banyaknya industri yang mempergunakan air bawah tanah dalam volume sangat besar. Industri yang menggunakan air bawah tanah tercatat 1003 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan yang tercatat memasang water meter sebanyak 593 perusahaan, sementara jumlah titik bor tidak secara pasti, sehingga dapat diduga bahwa pengambilan air bawah tanah yang sebenarnya jauh lebih besar dan yang tercatat.

b. Sumber Daya Lahan dan Hutan

Wilayah Kabupaten Bandung seluas 311.475,19 hektar merupakan wilayah dataran yang berupa cekungan serta pegunungan di sekitarnya, Wilayah dataran di bagian tengah cekungan Bandung merupakan kawasan persawahan yang subur tetapi sebagian diantaranya rawan banjir, Kota-kota yang merupakan satelit dan counter magnet dari Kota Bandung terdapat di wilayah ini, juga lokasi perusahaan industri. Areal perbukitan dan pegunungan di sebelah selatan dan utara merupakan kawasan budidaya hortikultur dan perkebunan yang subur, dan merupakan obyek wisata yang potensial.

Masalah yang dihadapi adalah banyaknya alih fungsi lahan yang cenderung menyebabkan semakin sempitnya kepemilikan lahan bagi petani, disamping itu masih terdapatnya lahan kritis yang pada akhir tahun 2000 masih seluas 22.463 hektar. Dengan adanya krisis multi dimensi, mendorong terjadinya penebangan liar di beberapa kawasan hutan sehingga luas lahan kritis cenderung meningkat.

c. Bumper Daya Pertambangan dan Energy

Potensi pertambangan di Kabupaten Bandung cukup besar, meliputi bahan galian golongan C berupa pasir, batu gamping, marmer, batu andesit, trass, kaolin, batu kuarsa, sirtu, pasir-pasir, yerosit, obsidian, emas, air tanah serta panas bumi, tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Padalarang, Cipatat, Margaasih, Batujajar, Cicalengka, Baleendah, Majalaya, Soreang, Pangalengan, Ibun dan Ciwidey. Sumber daya air bawah tanah cukup besar yang telah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk keperluan masyarakat maupun industri. Sedangkan sumber Daya panas bumi yang terdapat di kawasan Kamojang dengan kapasitas terpasang 140 MWe dan di Gunung Wayang Windu kapasitas terpasang 110 MWe serta di Gunung Patuha akan segera dikembangkan.

Potensi pertambangan pada saat ini belum dapat dimanfaatkan secara melalui kegiatan usaha penambangan yang professional. Selain itu masih banyak terjadi kegiatan penambangan secara liar dan tidak mengikuti anjuran teknis penambangan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, juga membahayakan lingkungan sekitarnya. Jumlah produksi pertambangan sendiri masih sulit untuk dipastikan karena terdapatnya kegiatan produksi dan pengangkutan yang tidak terditeksi.

2.1.4. Infrastruktur dan Tata Ruang

Infrastruktur sebagai sarana penunjang sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam pengembangan kegiatan ekonomi. Penyediaan infrastruktur pendukung harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai sinergi pembangunan. Berdasarkan data Jawa Barat (dalam Renstra Jawa Barat Tahun 2001- 2005), ketersediaan infrastruktur telah mampu mendukung tingginya investasi di wilayah Jawa Barat terutama di wilayah Bogor, Bekasi dan sekitar Bandung Raya. Demikian juga sistem jaringan telekomunikasi dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan dan sudah dapat menjangkau desa-desa dengan proporsi rata-rata di atas 50%.

Di sektor pengairan Kabupaten Bandung memiliki 27 DI (Daerah Irigasi) dengan luas areal pengairan 19.681 hektar yang kondisi bangunannya sebagian rusak ringan 23 (dua puluh tiga) bendung. Irigasi pedesaan (non teknis) sebanyak 978 DI dengan luas areal sekitar 38.556 hektar. Kondisi bendungan sebagian dalam keadaan rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menjamin kelancaran produksi.

Masalah yang masih dirasakan dalam pembangunan infrastruktur adalah belum terciptanya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pengembangan antar daerah. Disamping itu, belum seluruh kota yang memiliki Rencana Tata Ruang Terinci Perkotaan dari 17 (tujuh belas) kawasan perkotaan, Baru dapat disusun 11 (sebelas) Rencana Tata Ruang Terinci Perkotaan.

2.13. Pemerintahan

Di bidang pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah telah memberi kewenangan daerah untuk mengelola 11 (sebelas) kewenangan wajib. Sebagai salah satu dari 26 (dua puluh enam) daerah yang ditetapkan sebagai percontohan otonomi daerah, telah dilaksanakan penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan secara resmi pada tanggal 4 Mei 1995 oleh Gubernur Jawa Barat mewakili pemerintah pusat sekaligus penyerahan urusan personil, perlengkapan dan pembiayaan (3P). Kondisi sedikit banyak mempengaruhi kepada kegiatan dan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Konsekuensi dari keadaan ini adalah mutlak dilaksanakannya penataan kelembagaan perangkat daerah seperti telah dilaksanakan tahun ini. Untuk mengemban misi yang terkandung dalam otonomi daerah yaitu pengembangan potensi lokal dengan mengangkat partisipasi masyarakat menuju kemandirian daerah. Secara lebih luas, tolok ukur kemandirian daerah adalah kemampuan PAD/keuangan; kemampuan aparatur; kemampuan partisipasi masyarakat; kemampuan ekonomi; kemampuan demografi dan kemampuan organisasi dan administrasi

Tatanan yang ada dalam kurun 1 (satu) tahun setelah pencahangan otonomi daerah, masih tahap awal dan tampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh data PAD terhadap total APBD, yaitu bagi hasil pajak sebesar Rp 65,6 Milyar, bagi hasil pajak sumber daya alam Rp 6,9 Milyar sedangkan DAU Rp 734,1 Milyar. Di sisi perangkat daerah, dalam upaya redefinisi fungsi pemerintah, telah dilakukan pembentukan organisasi perangkat daerah yang dikukuhkan dengan Perda kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, dimana perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD; 19 Dinas Daerah; dan lembaga teknis daerah yang terdiri dari 8 Badan; 3 Kantor dan 5 RSUD, serta 43 kecamatan dan 7 kelurahan.

Di sisi aparatur pemerintah, ketersediaan sumber daya aparatur terdiri dari orang lulusan SMU, orang lulusan Strata 1, orang lulusan Strata 2 dari seluruh jumlah pegawai 26.769 orang dari persentase keseluruhan terlihat bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas aparatur.

2.2. Analisis SWOT

2.2.1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pemerintah Kabupaten Bandung. Kajian internal pada hakekatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi/posisi, kinerja, permasalahan dan potensi organisasi, yang mana Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah.

Kekuatan

Kondisi dan potensi daerah yang dipandang merupakan kekuatan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan rencana strategis pembangunan ditinjau dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat diuraikan di bawah ini.

a. Kekuatan Pemerintah

- 1) Jumlah aparatur dari berbagai bidang keahlian/profesi relatif tersedia.
- 2) Dilaksanakannya pendidikan dan latihan (diklat) struktural maupun fungsional secara teratur guna mendukung SDM aparatur
- 3) Tersedianya beberapa peraturan daerah yang mendukung/menunjang pelaksanaan program-program pembangunan.
- 4) Ditetapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru guna mendukung sistem kerja yang relatif lebih profesional.
- 5) Relatif besarnya potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- 6) Tersedianya IPTEK, khususnya teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian rakyat.
- 7) Banyak lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi inovator dalam hal penelitian berbagai bidang penunjang pembangunan.
- 8) Tersedianya prasarana dan sarana pemerintah yang memadai,
- 9) Tersedianya lembaga pendidikan formal dan non-formal, baik umum maupun kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Kekuatan Masyarakat

- 1) Dinamika, partisipasi dan daya kritis masyarakat dan swasta dalam pembangunan relatif tinggi.
- 2) Tumbuh berkembangnya berbagai lembaga advokasi masyarakat,

- 3) Masih adanya jiwa gotong royong dan kerukunan antar golongan masyarakat pada sebagian masyarakat.
- 4) Tumbuh berkembangnya berbagai kesenian dan kebudayaan tradisional/daerah.
- 5) Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif tinggi (IPM pada tahun 1999 : 62,33)
- 6) Minat masyarakat terhadap pendidikan relatif tinggi.
- 7) Adanya jiwa kewirausahaan pada masyarakat sehingga mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
- 8) Lokasi geografis yang strategis, mengelilingi Kota Bandung serta memiliki aksesibilitas tinggi ke Jakarta dan pusat kegiatan ekonomi lain.
- 9) Kondisi alam yang sejuk, tanah yang subur dan panorama yang indah sangat menunjang pengembangan pertanian dan pariwisata.
- 10) Tersedianya potensi sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan komparatif seperti komoditas pertanian dan pertambangan.

c. Kekuatan Swasta/Dunia Usaha

1. Tingginya minat investor lokal dalam melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Bandung.
2. Tersedianya lembaga-lembaga ekonomi swasta sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah antara lain lembaga keuangan dan pusat perdagangan.
3. Banyaknya pengusaha industri kecil dan menengah yang tangguh.
4. Banyak pengusaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar, yang berorientasi ekspor/pasar global,
5. Terbukanya peluang pasar bagi kegiatan industri, jasa, dan perdagangan.
6. Tersedianya penataan ruang kawasan dan zona bagi kegiatan industri, agribisnis dan permukiman.

Kelemahan

Kelemahan merupakan sisi negatif di dalam diri pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha yang dapat diperbaiki. Kelemahan di lihat dari ketiga pelaku pembangunan tersebut diuraikan di bawah ini,

a. Kelemahan Pemerintah

- 1) Masih relatif rendah kinerja kerja, etos kerja, dan disiplin bagi sebagian aparatur.
- 2) Masih adanya penerapan paradigma lama bagi sebagian aparatur
- 3) Rendahnya kewirausahaan birokrasi bagi sebagian aparatur pemerintah.
- 4) Masih adanya lokasi beberapa institusi pemerintah yang tersebar sehingga mengurangi/menghambat kelancaran pekerjaan dan koordinasi,

- 5) Sarana, prasarana serta penguasaan dan penerapan teknologi penunjang kerja belum optimal.
- 6) Belum tergalinya berbagai sumber-sumber pembiayaan baru secara optimal yang berasal dari masyarakat/swasta bagi kegiatan pembangunan.
- 7) Seiring terjadinya perbedaan data kegiatan pembangunan dari berbagai sumber data pemerintahan maupun sumber data.
- 8) Belum jelasnya pendelegasian kewenangan beserta kewenangan fiskal antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- 9) Masih rendahnya penegakan hukum serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum aparat pemerintah.
- 10) Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

b. Kelemahan Masyarakat

- 1) Masih rendahnya penerapan ajaran agama dalam kegiatan sosial-ekonomi masyarakat (belum berkembangnya keuangan yang Islami, misalnya rendahnya realisasi zakat, infak dan shadagoh).
- 2) Rendahnya kemampuan dan posisi tawar masyarakat lapisan bawah (*akar rumput/graves root*) untuk menyampaikan memperjuangkan hak aspirasinya.
- 3) Meningkatnya budaya dan rendahnya budaya kerja keras.
- 4) Masih rendahnya masyarakat terhadap pemahaman dan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.
- 5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Belum optimalnya pemahaman kehidupan berpolitik masyarakat.
- 7) Masih rendahnya pemberdayaan potensi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

c. Kelemahan Swasta/Dunia Usaha

- 1) Lemahnya inovasi dan rendahnya kepekaan dan daya Tangkap terhadap perubahan dinamika pasar.
- 2) Rendahnya profesionalitas bagi sebagian besar pelaku usaha.
- 3) Rendahnya kemampuan permodalan (rendahnya rentabilitas usaha).
- 4) Terbatasnya sistem informasi pasar dan penyediaan sarana pemasaran yang berimplikasi terhadap kelancaran distribusi produksi barang dan jasa.
- 5) Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya
- 7) Masih tingginya ketergantungan dunia usaha terhadap pemerintah,
- 8) Rendahnya pola kemitraan diantara pelaku dunia usaha.
- 9) Relatif belum berorientasi pada pasar global (ekspor).

2.2.2. Lingkungan Eksternal

Peluang

Peluang merupakan suatu kesempatan yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan kelemahan yang ada, baik dari pihak pemerintah, swasta/dunia usaha maupun masyarakat.

a. Peluang Pernerintah

- 1) Pemberlakuan Otonomi Daerah memberi kewenangan yang luas kepada daerah disertai perimbangan keuangannya.
- 2) Stabilitas politik dan keamanan serta penetapan kebijakan (policy) Baru pemerintah di bidang pembangunan ekonomi mendukung peningkatan aktivitas dunia usaha, penyerapan tenaga kerja serta pembiayaan publik
- 3) Banyaknya lembaga donor yang berminat memberikan bantuan program, bimbingan teknis dan pembiayaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kewirausahaan birokrasi (reinventing government) relative lebih meringankan tugas-tugas pemerintahan.
- 5) Upaya perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan peluang menghapuskan krisis kepercayaan masyarakat.
- 6) Tumbuh berkembangnya dunia usaha yang kondusif membawa implikasi pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
- 7) Pembentukan dan peningkatan status kotatiff cimahi menjadi kota merupakan peluang bagi sebagian aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung untuk dapat mengisi struktur organisasi pemerintahan yang akan dibentuk.
- 8) Terjalannya kerjasarna antar kabupaten/kota memberikan manfaat yang sinergis dalam kegiatan pembangunan di daerah.

b. Peluang Masyarakat

- 1) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha seiring dengan meningkatnya kegiatan dunia usaha (investasi PMA/PMDN.
- 2) Meningkatnya apsek masyarakat terhadap informasi pasar kerja global dan kemajuan IPTEK.
- 3) Banyaknya lembaga donor dan LSM yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Tumbuh berkembangnya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang dibangun oleh pemerintah/swasta diharapkan akan memberikan kontribusi bagi daya tampung pendidikan bagi masyarakat.
- 5) Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 membuka dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan secara lebih luas.
- 6) Berkembangnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat memberikan dorongan untuk menyampaikan aspirasinya secara lebih efektif.

c. Peluang Swasta/Dunia Usaha

- 1) Terbukanya pasar ASEAN mulai tahun 2003.
- 2) Banyaknya pilihan sumber permodalan dan mitra usaha bagi pengembangan usaha produktif.
- 3) Rendahnya nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya saing pengusaha ekspor (*eksportir*) yang berbasis sumber daya lokal.
- 4) Penetapan lata ruang wilayah yang lebih legitimate, komprehensif, terpadu dan konsisten mendorong merupakan peluang investasi swasta.
- 5) Adanya skim-skim kredit memberikan penguatan modal bagi pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
- 6) Besarnya sumber daya alam lokal memudahkan penyediaan penyediaan bahan baku produksi (*raw materials*).
- 7) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas (memenuhi syarat) relatif tersedia.
- 8) Tersedianya lembaga ekonomi perbankan, lembaga ekonomi non perbankan serta lembaga profesi lainnya dalam mendukung kegiatan dunia usaha.
- 9) Kemudahan peleyanan perijinan bagi kegiatan ekonomi di daerah.

Ancaman

Berbagai pengaruh dan kondisi dari luar daerah serta pengaruh dan kondisi global yang negative akan menimbulkan kerugian dan menjadi ancaman, baik terhadap pemerintah, masyarakat maupun swasta/dunia usaha.

a. Ancaman Pemerintah

- 1) Keamanan, situasi politik nasional dan regional relative kurang kondusif.
- 2) Tingginya persaingan antar daerah dalam menarik investor.
- 3) Pelimpahan aparatur pemerintah pusat dan propinsi ke Kabupaten Bandung seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 4) Adanya kecenderungan berkurangnya dana perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU) bagi daerah.
- 5) Menurunnya kepercayaan investor
- 6) Meningkatnya jumlah pengangguran.
- 7) Terbatasnya struktur organisasi pemerintah daerah yang tersedianya akibat adanya penataan organisasi (STOK) baru.
- 8) Berkurangnya pendapatan daerah secara akumulatif akibat peningkatan status Cimahi menjadi kota.

b. Ancaman Masyarakat

- 1) Banyaknya penggunaan tenaga kerja asing
- 2) Adanya penguasaan tanah dan kekayaan daerah oleh pihak asing
- 3) Maraknya penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan remaja dan seks bebas.
- 4) Kesenjangan social-ekonomi dan ketidakpuasan social masyarakat dapat menimbulkan konflik dan gejolak social
- 5) Pesatnya pertumbuhan penduduk menambah tingkat pengangguran, menambah beban pelayanan public dan penurunan daya dukung lingkungan.
- 6) Penurunan moralitas masyarakat.
- 7) Berkurangnya lahan-lahan pertanian produktif akibat alih fungsi menjadi permukiman dan industry.
- 8) Kerusakan dan menurunnya daya dukung lingkungan akibat pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali.
- 9) Bencana alam, terutama banjir dan gerakan tanah/longsor serta kekeringan dan serangan hama.

c. Ancaman Swasta/Dunia Usaha

- 1) Persaingan produk-produk local dengan produk-produk impor semakin berat.
- 2) Rendahnya nilai tukar rupiah menurunkan kemampuan untuk membeli bahan baku dan peralatan dari luar negeri (bagi swasta yang menggunakan muatan impor).
- 3) Politik dan keamanan yang kurang kondusif serta kebijakan/peraturan pemerintah yang berubah-ubah.
- 4) Inflasi dan ketidakstabilan moneter yang mendorong penerapan kebijakan uang ketat.
- 5) Penurunan daya beli masyarakat akibat krisis berkepanjangan.
- 6) Pesatnya kenaikan harga lahan industry
- 7) Kebijakan pemerintah (peraturan daerah, dan lain-lain) yang kurang tepat akan menyebabkan inefisiensi kegiatan dunia usaha.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Bandung adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"***.

Berdasarkan Visi di atas, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berkeadilan;
2. Menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai, dan dinamis;
3. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan
4. Mernberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan iman dan tagwa;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

3.2 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur yang berkaitan secara luas dengan misi, dalam hal mana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana pencapaian keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana dari unsure pelaku pembangunan (*stakeholders*) serta peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang digunakan instansi pemerintah dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis melalui SWOT apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dapat identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) yang menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

Faktor penentu pertama yang harus diciptakan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung adalah harus terciptanya stabilitas politik dan keamanan secara nasional, regional maupun lokal. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi nasional yang belum sepenuhnya pulih, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap mantapnya keamanan dan ketertiban di daerah. Dengan demikian pemantapan fungsi dan peran lembaga politik harus menjadi prioritas penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah.

Tegaknya supermasi hukum dan hak azasi manusia menjadi faktor penentu keberhasilan yang akan menjamin ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga stabilitas sosial, politik dan keamanan diharapkan akan terwujud. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan faktor penentu keberhasilan pembangunan, yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih serta berkeadilan yaitu sangat ditentukan oleh

Aparatur yang transparan, akuntabel, profesional dan bebas KKN. Hal ini perlu didukung oleh faktor kunci keberhasilan lainnya yang cukup penting yaitu di dorong oleh Peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk memberdayakan masyarakat dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam keputusan publik, pada setiap kegiatan pembangunan termasuk pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme yang berlaku.

Terciptanya kematangan berpolitik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung melalui peningkatan kualitas demokrasi di daerah yang diharapkan dapat mempercepat reformasi disegala bidang, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat menciptakan kondisi dan iklim yang lebih kondusif. Pada gilirannya faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dalam menentukan pencapaian keberhasilan pembangunan melalui Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah (eksekutif) dan mantapnya peran legislatif, yang saat ini menurun akibat kegagalan pemerintahan terdahulu dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan belum mampunya pemerintahan saat ini memulihkan keadaan seperti yang diharapkan. Terwujudnya kepercayaan terhadap dapat didorong oleh upaya peningkatan kualitas pengawasan, baik pengawasan politik, pengawasan fungsional *dan* pengawasan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian Visi dan misi Kabupaten Bandung akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan.

Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian secara prioritas dari hasil analisis lingkungan strategis yang merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, yaitu diantaranya diperlukan peningkatan pengalaman dan penerapan kaidah-kaidah agama dan budaya perilaku dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung baik dalam tatanan pondasi pemerintahan maupun kemasyarakatan. Penerapan nilai-nilai serta kaidah-kaidah agama perlu dikedepankan, karena merupakan potensi dasar yang dimiliki Kabupaten Bandung. Masyarakat Kabupaten Bandung yang seluruhnya merupakan umat beragama, dan sebagian baru menganut agama Islam dan memiliki nilai-nilai budaya. Adanya perubahan-perubahan yang berkembang sangat pesat akibat globalisasi dan arus informasi, dikhawatirkan dapat mengusik pada kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, serta menyebabkan krisis akhlak didalam tatanan kehidupan termasuk dalam proses kegiatan pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan didalam pengembangan potensi ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur merupakan fasilitas dalam meningkatkan dan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat, karena itu adanya kemampuan pemerintah dalam membangun serta mewujudkan ketersediaan layanan infrastruktur menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu faktor keberhasilan layanan

infrastruktur dapat berimplikasi terhadap pemerataan aksesibilitas sumberdaya ekonomi.

Krisis ekonomi telah membawa keterpurukan kondisi perekonomian masyarakat yang menjadi kendala dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, peningkatan peran dunia usaha melalui investasi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian akibat krisis ekonomi di daerah yang harus mendapat dukungan pemerintah dan seluruh pelaku usaha dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

Sebagai faktor keberhasilan berikutnya dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang tidak kalah pentingnya adalah adanya keterpaduan perencanaan nasional, daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang komprehensif dan integratif dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa factor-faktor penentu keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan secara nasional, regional maupun local,
2. Tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia
3. Aparatur yang transparan, akuntabel, profesional dan behas 10(14).
4. Peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk memberdayakan masyarakat dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam keputusan publik.
5. Terciptanya kematangan berpolitik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
6. Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah (eksekutif) dan mantapnya peran legislatif.
7. Tingginya kualitas sumberdaya manusia.
8. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Meningkatnya pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah agama dan budaya dalam perilaku dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung baik dalam tatanan pondasi pemerintahan maupun kemasyarakatan.
10. Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi,
11. Meningkatnya peran dunia usaha melalui kegiatan investasi dan partisipasi masyarakat.
12. Pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
13. Keterpaduan perencanaan nasional daerah propinsi. Daerah kabupaten dan daerah kota.

3.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pemerintah dan akan menggambarkan arah strategik serta kondisi-kondisi yang ingin diciptakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Keberhasilan mencapai sasaran sangat penting ditinjau dari :

1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan.
2. Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja pemerintahan.
3. Sebagai alat untuk memicu agar semua organisasi pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan, karena adanya bidang-bidang kegiatan yang kurang berhasil pada tingkat yang diharapkan.

Sasaran operasional tahunan yang ditetapkan hendaknya mengandung pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unsur-unsur pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan. Adapun penetapan tujuan dan sasaran dari masing-masing Misi Kabupaten Bandung diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan, Berkeadilan.

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertanggungjawab, efisien, efektif, demokratis, transparan, akuntabel, dan adil.

Misi Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkeadilan dijabarkan ke dalam 2 tujuan, yaitu :

a. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dan beberapa aspek. Dan aspek pelayanan masyarakat, tolak ukur efisiensi dilihat dari kemudahan, kecepatan, biaya dan kualitas pelayanan.

Kemudian efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari sejauh mana law and order dapat dilaksanakan dan ditegakkan serta sejauh mana, tujuan, sasaran pembangunan tercapai dan dilaksanakan secara tetap asas (konsisten). Secara lebih umum, sejauh mana fungsi-fungsi dan peran pemerintah dilaksanakan dengan baik.

Sasaran :

1. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penerimaan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
3. Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas serta meningkatnya kinerja aparatur yang ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas, kewenangan yang diberikan dan tuntutan perkembangan pembangunan.

b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berarti setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut dengan kata lain perobangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan

meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Sasaran :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan Hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Terwujudnya pemberantasan KKN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang didukung oleh penegakan hukum berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
5. Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara.

Misi 2 : Menciptakan Kondisi yang Aman, Tertib, dan Dinamis

Keamanan, ketertiban dan kedamaian merupakan tiga pilar kondisi masyarakat agar dapat menyelenggarakan kehidupan yang normal, sehingga dapat melangsungkan aktivitas tanpa rasa takut atau tertekan. Kondisi dinamis berarti aktivitas masyarakat dapat berubah, bergerak sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini, yaitu :

• **Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtibmas)**

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan modal dasar pembangunan. Iklim berusaha yang nyaman, jaminan kelanggengan berusaha, tingginya minat berinvestasi akan dapat tercipta dengan adanya tramtibmas. Terciptanya ketenteraman, dan ketertiban mencerminkan kesadaran dan ketaatan pemerintah dan masyarakat terhadap hukum relatif tinggi. Kondisi tramtibmas dapat tercipta lebih cepat apabila budaya Sunda yang mempunyai prinsip "silih asah, silih asuh, silih asih" diterapkan secara konsisten.

Sasaran :

1. Terciptanya sistem politik yang demokratis, terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat.
2. Terlaksananya penerapan dan penegakan hukum serta perlindungan terhadap HAM di daerah.
3. Terciptanya kepatuhan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparaturnegara.
4. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan berlangsungnya kehidupan sehari-hari warga masyarakat, aman, tenteram dan damai.
5. Terwujudnya pendayagunaan secara optimal dan terpadu segenap kekuatan potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Misi 3 : Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Konsekuensi pembangunan adalah pendayagunaan berbagai sumberdaya, baik sumberdaya alam, manusia dan dana. Jika tidak dilakukan secara bijaksana, dalam waktu singkat sumberdaya alam akan mengalami kepunahan. terutama yang bersifat "tidak terbarukan". Demi menyelenggarakan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi, pembangunan harus terus berlangsung, oleh karna itu keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam perlu dijaga tanpa kecuali. Penjabaran misi ini tercermin dalam tujuan :

a. Memelihara keseimbangan Alam dan Daya Dukung Lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan tak dapat dihindari dalam setiap aktivitas pembangunan. Pengelolaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan untuk menjamin kelestarian alam dan lingkungan.

Sasaran :

1. Terjaganya keseimbangan lingkungan sebagai daya dukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Terkendalinya pencemaran lingkungan yang meliputi gangguan pencemaran limbah (domestik, industri/B3, dan sampah) dan penemaran udara.

b. Peningkatan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan penataan ruang sangat erat kaitannya dengan upaya memelihara keseimbangan alam dan daya dukung lingkungan. Ruang merupakan salah satu sumber daya berperan sebagai wadah atau tempat berbagai aktivitas masyarakat dilakukan. Pemanfaatan ruang harus diatur sehingga memberikan manfaat yang optimal dengan sekecil rnungkin eksternalitas (dampak samping) negatif yang timbul.

Sasaran :

1. Terwujudnya efektifitas penataan ruang.
2. Tersedianya rencana rata ruang yang operasional dan legitimate.
3. Meningkatnya keterpaduan antara kebijakan dan program pembangunan.

Misi 4 : Memberdayakan dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Berlandaskan iman dan Taqwa.

Untuk mendorong terciptanya masyarakat madani yang maju dan mandiri, dalam rangka menghadapi era globalisasi dan penerapan otonomi daerah. perlu terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas sekaligus produktivitas materil dan spiritual masyarakat. Peningkatan kualitas meliputi peningkatan kemampuan, kemandirian dan kepercayaan diri, keimanan dan ketakwaan, serta kesehatan masyarakat, dengan demikian penilaian IPM merupakan salah satu pengkajian.

Muara dari upaya tersebut adalah meningkatnya produktivitas masyarakat melalui upaya perluasan lapangan kerja. Dengan demikian. tujuan yang tercakup di dalam misi ini adalah :

a. Meningkatkan Kemampuan Kepercayaan Diri dan Kemandirian Masyarakat

Peningkatan kemampuan masyarakat meliputi ilmu pengetahuan, wawasan, serta keterampilannya. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan adalah yang berguna dan menunjang pendayagunaan sumber daya ekonomi lokal dan/atau yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Peningkatan kemandirian secara individual diarahkan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, sedangkan secara kolektif meningkatkan modal sosial (social capital) agar dapat, memecahkan permasalahan sosial-kemasyarakatan secara mandiri. Kepercayaan diri menyangkut pula rasa memiliki kebanggaan terhadap negara/daerah sendiri beserta produk negara/daerahnya. Kemandirian memerlukan proses untuk mewujudkannya, selain menyangkut faktor religi juga perlu ditunjang oleh kemampuan ekonomi dan kesehatan.

Sasaran :

1. Terselenggaranya peningkatan mutu pendidikan.
2. Tereapainya perangkatan angka partisipasi sekolah dan lama sekolah
3. Terciptanya peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat.

b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan erat kaitannya dengan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Derajat kesehatan masyarakat tercermin di dalam Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu Hamil, dan Status Gizi masyarakat.

Sasaran :

1. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Terwujudnya kemudahan sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3. Terciptanya perilaku masyarakat yang mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.
4. Terkendalinya penyebaran dan distribusi serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

c. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan dan hasil-hasilnya belum dapat dinikmati secara merata oleh setiap penduduk. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan. Di sisi sosial budaya, aspek prioritas yang akan ditingkatkan meliputi kependudukan dan transmigrasi, ketenagakerjaan, generasi muda, olah raga, seni dan budaya daerah, serta penanggulangan kasus-kasus sosial.

Pertumbuhan penduduk relatif tinggi merupakan masalah yang harus diantisipasi terutama berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang nurus menyertainya, baik berupa perumahan, pendidikan, pangan dan lain-lain agar tercapai kesejahteraan yang lebih merata.

Di sisi ketenagakerjaan, tujuan ideal pembangunan ketenagakerjaan adalah tercapainya full employment yaitu semua warga masyarakat dalam katagori usia

angkatan kerja produktif mempunyai pekerjaan dan dengan demikian mempunyai penghasilan tetap. Dengan kata lain, lapangan kerja yang tersedia mampu menyerap semua pencari kerja. Pendidikan keterampilan yang diselenggarakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Generasi muda adalah penerus bangsa yang perlu mendapat pembekalan optimal dalam rangka meningkatkan pemberdayaannya menghadapi persaingan global, baik di sisi pendidikan, usaha, kesehatan fisik dan mental juga tetap memiliki jiwa kecintaan akan daerahnya. Oleh karena itu disamping pendidikan formal, kejuruan, non formal dan agama, perlu pula peningkatan di sisi fisik melalui olahraga serta di sisi mental melalui peningkatan seni dan budaya. terutama budaya daerah.

Di sisi lain, sebagian penduduk masih menyangang kasus-kasus sosial, sebagian pula mengalami musibah menjadi korban bencana alam. Pemerintah daerah dalam hal ini tetap melakukan tindakan rehabilitasi dan bantuan sosial dalam upaya mengurangi beban kehidupan dan meningkatkan keseimbangan pembangunan, disamping itu pula mendorong peran masyarakat luas untuk berperan serta.

Sasaran :

1. Tercapainya keberhasilan Program Keluarga Berencana pemerataan jumlah penduduk dan kualitas pelayanan masalah kependudukan.
2. Tercapainya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Tercapainya penyelesaian masalah-tnasalan ketenagakerjaan.
4. Terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan potensi kepemudaan dalam kegiatan pembangunan daerah, termasuk peningkatan prestasi olahraga.
5. Terwujudnya pengembangan dan kelestarian seni dan budaya daerah.
6. Tersedianya pelayanan sosial oleh pemerintah dan lembaga/organisasi pelayanan sosial bagi masyarakat.
7. Terhindarnya masyarakat dari penyakit masyarakat.

d. Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa (Imtaq)

Sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pembangunan agama dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama pembangunan agama adalah meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap sisi kehidupan dan memantapkan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai. Dengan meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat. setiap aktivitas akan dilandasi niat yang baik agar bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat, dengan demikian diharapkan kualitas dan produktivitaspun meningkat.

Sasaran :

1. Terciptanya masyarakat Kabupaten Bandung yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terwujudnya sistem kelembagaan pelayanan masyarakat dalam ketaatan keagamaan.

3. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pengamalan ajaran agama masing-masing.
4. Meningkatnya kesadaran untuk menegakan etika dalam penyebaran agama.
5. Meningkatnya fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam bermasyarakat.

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata adalah melalui pendekatan yang bertumpu pada kegiatan ekonomi di daerah. Pengembangan ekonomi di daerah dilakukan secara demokratis sesuai keinginan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi diharapkan mampu berperan aktif dalam mengembangkan roda perekonomian daerah melalui pemanfaatan potensi daerah seperti sumber daya lokal, sumber permodalan, lembaga ekonomi daerah, sarana prasarana ekonomi dan teknologi.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi di daerah menitikberatkan pada keberpihakan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal. Kuatnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh aturan hukum yang adil (fair) diharapkan akan mempercepat terwujudnya demokrasi ekonomi. Tujuan akhir dari pengembangan ekonomi daerah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

a. Mengembangkan Ekonomi Rakyat dan Demokrasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah yang akan dilaksanakan mempunyai keberpihakan serta dampaknya dapat langsung menyentuh pada masyarakat akar rumput (grass root). Yaitu masyarakat paling bawah yang bahkan kadang-kadang tidak mampu mendefinisikan keinginan dan kebutuhannya.

Ekonomi kerakyatan didasarkan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat, dengan demikian tercipta demokrasi ekonomi. Wujud usaha ekonomi rakyat dikategorikan pada usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi, Pengembangan ekonomi kerakyatan pada gilirannya dapat mengimbangi struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang sebelumnya sebagian besar dikuasai oleh segelintir pengusaha bermodal kuat menjadi di bawah penguasaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi yang jumlahnya banyak. Dengan demikian, terjadi pemerataan aktivitas pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat luas.

Sasaran :

1. Terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada pemanfaatan sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan.
2. Terbangunnya sarana dan prasarana dasar bagi kegiatan ekonomi daerah
Terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.
3. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat didaerah.
4. Terciptanya peningkatan komoditas unggulan daerah.

5. Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan.
6. Terciptanya keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.
7. Terciptanya peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang mampu mendorong pemasaran hasil produk daerah.
8. Tercapainya peningkatnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di daerah.
9. Terciptanya manajemen / pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

BAB IV
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
(STRATEGI)

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan melalui strategi pembangunan, yang dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. Selain merupakan upaya untukantisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan bagi kegiatan operasional organisasi pemerintahan. Dengan demikian strategi akan dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi pembangunan Kabupaten Bandung dalam proses pencapaian visi dan misi, berdasarkan hasil analisis lingkungan strategik, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten dan konsekuen dalam rangka memantapkan pelaksanaan reformasi disegala bidang.
- b. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis di daerah.
- c. Melaksanakan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
- d. Memantapkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap dampak kegiatan pembangunan yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- f. Melaksanakan pemanfaatan konsep tata ruang dalam kegiatan pembangunan secara konsisten.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan layanan pendidikan secara optimal serta perwujudan angka partisipasi sekolah dan pencapaiann rasio lama sekolah secara signifikan.
- h. Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata melalui peningkatan kualitas pelayanan, kualitas kesehatan lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian obat-obatan.
- i. Mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengantisipasi masuknya budaya luar yang merusak tatanan budaya daerah.
- j. Menanggulangi masalah-masalah ketenagakerjaan secara terpadu dan menyeluruh. serta memberdayakan potensi angkatan kerja.
- k. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah.
- l. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian daerah.
- m. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki secara optimal dan berwawasan lingkungan.
- n. Mengembangkan potensi dan kegiatan ekonomi daerah yang mempunyai keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.
- o. Mempersiapkan pemerintah dan dunia usaha untuk mengantisipasi perdagangan bebas.
- p. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penerimaan dan pembiayaan pemerintah.
- q. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah melalui penguatan manajemen dan peningkatan kinerja usaha.

Adapun kebijakan dan program untuk setiap strategi adalah sebagai berikut :

4.1 Bidang Penyelenggaraan Peverinitahan

Strategi : Mewujudkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten dan konsekuen dalam rangka memantapkan pelaksanaan reformasi disegala bidang, kebijakan; Menjajikan redefinisi peran dan fungsi pemerintahan yang secara profesional, akuntabel, beretika moral, dan transparan sesuai dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan motivator dengan program; Program Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif, program peningkatan semangat Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurial Spirit) Birokrasi, Program Pendelegasian Kewenangan Kepemerintahan dan Kabupaten ke Kecamatan. Kelurahan dan Desa. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Program Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Pengawasan Aparatur Pemerintahan, Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Pertahanan. Rincian kegiatan prioritas disajikan pada Bab V.

4.2 Bidang Politik

Strategi : Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis di daerah, melalui kebijaksanaan; Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat, buday politik yang demokratis, menghormati aspirasi-aspirasi yang berkembang, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak kehidupan demokrasi di daerah, dengan program; Program Pengembangan Kehidupan Berpolitik. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.3 Bidang Hukum

Strategi : Melaksanakan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM melalui kebijakan; Pertama Mengembangkan budaya hukum masyarakat di daerah untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan HAM berdasarkan kebenaran dan keadilan, **dengan Program**; Program Sosialisasi dan Bantuan Hukum. Kedua Menata sistem hukum di daerah yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum positif berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan mengembalikan peraturan-peraturan di daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, **dengan Program** Program Penegakan Supremasi Hukum. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.4 Bidang Keamanan dan Ketertiban

Strategi : Memantapkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban, melalui kebijakan; Pertama Meningkatkan kemampuan, ketahanan dan ketertiban serta kemampuan masyarakat untuk berswadaya aktif dalam menanggulangi dan atau memperkecil berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dengan program; Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kedua Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan kemanan dan ketertiban di masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran, tanggung jawab dan peran serta untuk melaksanakan sistem keamanan lingkungan secara swakarsa, **dengan Program**; Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.5 Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Strategi : Meningkatkan pengawasan terhadap dampak kegiatan pembangunan yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan, **melalui kebijakan**; Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan kaidah-kaidah ramah lingkungan dengan program; Program Penanggulangan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, Peningkatan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan, Pendaayagunaan Dan Pengelolaan Limbah. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

Strategi : Melaksanakan pemanfaatan konsep tata ruang dalam kegiatan pembangunan secara konsisten melalui kebijakan; Mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang wilayah serta mengembangkan kesadaran Para pelaku pembangunan untuk mengimplementasikan tata ruang wilayah secara konsisten, dengan program; Program Penataan Ruang. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.6 Bidang Pendidikan

Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan layanan, pendidikan secara optimal serta perwujudan angka partisipasi sekolah dan pencapaian rasio lama sekolah secara signifikan. melalui kebijakan; Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas secara formal dan non formal bagi seluruh masyarakat di daerah serta meningkatkan kaidah agama dalam sistem pendidikan, dengan Program; Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Program Wajar Dikdas 9 Tahun. Program Peningkatan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kejuruan. Program Pengembangan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU). Rician kegiatan disajikan pada Bab V.

4.7 Bidang Kesehatan

Strategi : Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kualitas kesehatan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma hidup sehat. **melalui kebijakan**; Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata melalui peningkatan kualitas pelayanan, kualitas kesehatan lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian obat-obatan, Meningkatkan Mengembangkan sistem dan mutu pelayanan kesehatan, **dengan Program**; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Budaya Hidup Bersih, Sehat dan Berkualitas. Program Penanggulangan Penyakit. Program Perbaikan Gizi. Program Kesehatan, Perlindungan Ibu Anak dan Reproduksi, Program Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Obat-obatan, Makanan dan Minuman, Peralatan kesehatan serta kosmetika, Program Kesehatan Lingkungan. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.8 Bidang Sosial Budaya

Strategi : Meningkatkan pengendalian kependudukan melalui kebijakan; Meningkatkan pengendalian kuantitas penduduk dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, pemerataan penyebaran penduduk, mencegah arus urbanisasi serta penertiban administrasi kependudukan, **dengan program**; program peningkatan pelayanan kependudukan dan transmigrasi. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

Strategi : mengembangkan budaya, minat dan bakat (olah raga dan kesenian), ketahanan dan kepedulian sosial serta mempertahankan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengantisipasi masuknya budaya luar yang merusak tatanan budaya daerah, **melalui kebijakan**; Kesatu Mengembangkan kepedulian antar sesama masyarakat Kabupaten Bandung dengan program dan Bantuan Sosial, Kedua Mengembangkan budaya olah raga dan kesenian, penyaluran bakat dan minat, pembinaan serta peningkatan kegiatan-kegiatan olah raga dan kesenian dengan Program; Program Pemberdayaan Generasi Muda dan olah raga. Pengembangan Seni dan Budaya Daerah. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.9 Bidang Ketenagakerjaan

Strategi : menanggulangi masalah-masalah ketenagakerjaan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberdayakan potensi angkatan kerja, melalui kebijakan; Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja, pemahaman hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja, serta pemberdayaan potensi ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dengan Program; Program Pemberdayaan Ketenagakerjaan dan Program Perlindungan Ketenagakerjaan. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.10 Bidang Agama

Strategi : Memantapkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah, melalui kebijakan; Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah, mendorong penyediaan sarana dan prasarana agama dengan program; Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat, Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Peningkatan kerukunan Beragama. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Agama. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.11 Bidang Pembangunan Wilayah

Strategi; Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian daerah, **melalui kebijakan**; mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan penggalian potensi-potensi ekonomi di daerah, ketertiban dan ketentraman dengan program; Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Kota Baru. Program Pengembangan Jaringan Prasarana Dasar Wilayah. Program Pengembangan Utilitas Umum. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.12 Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam

Strategi : Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki secara optimal dan berwawasan lingkungan **melalui kebijakan**; Mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah yang mempunyai keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif seperti pertanian, pertambangan dan kepariwisataan sebagai landasan pengembangan ekonomi unggulan di daerah dan daya tarik daerah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, dengan Program; Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Program Pengembangan Pertanian, Program Pengelolaan Pertambangan dan Energi. Program Pengembangan Kepariwisata, Utilitas Umum. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

4.13 Bidang Ekonomi

Strategi Pertama : Mengembangkan potensi dan kegiatan ekonomi daerah yang mempunyai keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan **melalui kebijakan**; Mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan, **dengan program**; Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan, Program Pengembangan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), Program Pengembangan Industri Manufaktur.

Strategi Kedua : Mempersiapkan Pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi pemberlakuan perdagangan bebas (AFTA), melalui kebijakan; Memfasilitasi kegiatan promosi produk unggulan daerah yang berorientasi global, Mendorong pemberdayaan peran dan fungsi Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA). dengan program; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Strategi Ketiga : Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan termasuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penerimaan dan pembiayaan pemerintah, melalui kebijakan; Meningkatkan penerimaan asli daerah dan pelaksanaan anggaran kinerja, dengan program; Program Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah.

Strategi Keempat : Meningkatkan investasi dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat krisis, dan mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah; melalui kebijakan Mendorong kegiatan investasi di daerah serta pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi yang sudah berjalan dengan program; Program Peningkatan Promosi dan Investasi. Rincian kegiatan disajikan pada Bab V.

BAB V
DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN
KEGIATAN DAERAH

Dalam upaya mengevaluasi dan menilai secara lebih objektif, maka perlu ditetapkan dan disepakati indikator keberhasilan untuk setiap program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang, kemudian disusun kedalam matriks yang dikelompokkan sebagai berikut : Bidang, Program, Kegiatan Pokok Strategis, dan Indikator Keberhasilan.

Secara substantif, rencana strategi sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab IV dapat disederhanakan ke dalam 13 bidang/aspek pembangunan yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan
2. Bidang Politik
3. Bidang Hukum
4. Bidang Keamanan dan Ketertiban
5. Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
6. Bidang Pendidikan
7. Bidang Kesehatan
8. Bidang Sosial Budaya
9. Bidang Ketenagakerjaan
10. Bidang Agama
11. Bidang Pembangunan Wilayah
12. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
13. Bidang Ekonomi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketiga belas bidang/aspek tersebut dapat dinilai dari pencapaian indikator keberhasilan di atas sebagaimana secara garis besar diuraikan pada tabel di bawah ini :

Matriks Indikator Keberhasilan

| No. 1 | Bidang 2 | Program 3 | Kegiatan Strategis 4 | Indikator Keberhasilan 5 |
|----------|----------------------------|--|--|---|
| 1. | Penyelenggaraan pemerintah | <p>1 peningkatan manajemen pembagunan partisipatif</p> <p>2 Peningkatan kewirausahaan birokrasi</p> <p>3 Pendelegasian kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan, Kelurahan, dan Desa</p> | <p>1 Mendorong dan mengembangkan kerjasama antara pelaku pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat.</p> <p>1 Penyusunan perencanaan privatisasi dalam sektor pelayanan publik.</p> <p>2 Pengembangan privatisasi melalui kegiatan promosi investasi.</p> <p>1 Pengembangan konsep pembagian dan/atau pendelegasian kewenangan antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.</p> | <p>– Meningkatnya partisipasi dan kerjasama pembangunan dalam masyarakat, antara lain dengan keikutsertaan sektor swasta, masyarakat dan LSM dalam pertemuan/rapat setiap proses pembangunan; meningkatnya jumlah masyarakat yang aktif dalam pembangunan.</p> <p>– Adanya privatisasi sebagian pelayanan publik.</p> <p>– Semakin pendeknya rentang pelayanan sebagian urusan pelayanan publik bagi masyarakat melalui kemandirian kecamatan desa/kelurahan melalui pendelagasian sebagian kewenangan di 27 bidang : bidang pemerintahan, perencanaan daerah, pengawasan daerah pengendalian lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengembangan informasi daerah, administrasi keuangan daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban daerah, pengembangan otonomi daerah, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, kebudayaan dan pariwisata, perindustrian dan penanaman modal,</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--|---|--|
| | | 4 penataan organisasi perangkat daerah | <p>1 Penataan struktur organisasi (tata kerja dan analisis jabatan) dan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah.</p> <p>2 Melakukan penataan manajemen kepegawaian.</p> <p>3 Penyempurnaan sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran pegawai.</p> | <p>perdagangan dan pengelolaan pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, bina marga, pengairan, pemukiman dan tata wilayah, lalu lintas dan angkutan jalan, kebersihan, pertambangan dan energi, kesejahteraan sosial dan pendapatan daerah.</p> <p>– Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dengan penataan SOTK; penataan wilayah administrasi pemerintahan melalui pemekaran, penghapusan, penggabungan kecamatan/kelurahan/desa, perubahan status.</p> <p>– wilayah administrasi pemerintahan; peningkatan pengelolaan kepegawaian meliputi kesesuaian penempatan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian; kenaikan pangkat tepat waktu; Pemberian insentif bagi aparatur.</p> |
| | | 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja | <p>1 Pembangunan sistem informasi manajemen (SIM) terpadu.</p> <p>2 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan.</p> <p>3 Penyediaan sarana penunjang operasional kerja.</p> <p>4 Pengembangan sarana dan Prasarana Ibu Kota Kabupaten.</p> | <p>– Meningkatnya pelayanan publik, yaitu dengan tersedianya SIMDA terpadu; tersedianya bangunan dan perlengkapan kerja bagi seluruh unit kerja (31 Dinas/Instansi); tertatanya Ibu Kota Kabupaten disertai selesainya pemindahan seluruh unit kerja ke Soreang pada tahun 2005, sehingga masyarakat tidak Perlu menempuh beberapa lokasi untuk penyelesaian pelayanan.</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|------------|---------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6 Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur | <p>1 Penyelenggaraan diklat penjenjangan struktural, teknis dan fungsional. tugas belajar, penyusunan modul dan studi banding.</p> <p>2 Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyusunan AKIP/LAKIP.</p> <p>3 Mendorong pemberdayaan BPD (Badan Perwakilan Desa) dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam bidang administrasi pemerintahan, penataan organisasi, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.</p> | <p>– Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan tersedianya aparat berpendidikan yang sesuai, yaitu 40 orang pejabat eselon II (setingkat Kepala Dinas) berpendidikan SPAMEN; 250 pejabat eselon III berpendidikan SPAMA; serta tersedianya aparat teknis yang memiliki pendidikan teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya; Tersedianya pejabat eselon II dan III, serta sebagian eselon IV terbina AKIP/LAKIP; Meningkatnya disiplin aparat desa dan anggota BPD serta sebagian anggota lembaga kemasyarakatan terlatih tentang pengetahuan umum pemerintahan dan pembangunan; Memahami tugas dan fungsi masing-masing.</p> |
| | | 7 Peningkatan Pelayanan Publik | <p>1 Menyusun Standarisasi pelayanan publik yang memuaskan, transparan dan tidak diskriminatif.</p> <p>2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu sebagai cikal bakal privatisasi pelayanan publik.</p> | <p>– Terwujudnya proses pelayanan publik yang sederhana bagi masyarakat.</p> |
| | | 8 Pengawasan Aparatur Pemerintah | <p>1 Meningkatkan pendayagunaan lembaga pengawasan fungsional.</p> | <p>– Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dengan tersedianya LAKIP di setiap Dinas/Instansi yang dievaluasi setiap tahun; dan berkurangnya penyimpangan</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|------------|---------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Politik | 9 Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi | 2 Mendorong pelaksanaan pengawasan publik dan mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan publik. | dalam penyelenggaraan pemerintahan. |
| | | | 3 Meningkatkan AKIP dan mengevaluasi LAKIP. | |
| | | | 1 Mengembangkan kemitraan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan dengan media massa. | – Meningkatnya arus informasi dan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya antara masyarakat sendiri melalui peningkatan publikasi dan informasi multi media baik media konvensional, media cetak, dan media luar ruang. |
| 2 | Politik | 1 Pengembangan Kehidupan Berpolitik | 1 Menjamin kebebasan berserikat dan berkelompok setiap warga masyarakat melalui Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan pilihan, minat, pendirian dan keyakinan masing-masing. | – Terciptanya keamanan persepsi dan wawasan politik bagi masyarakat, antara lain dengan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan dan partai politik; Terwujudnya kehidupan yang lebih harmonis ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunjang terciptanya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa; Terciptanya komunikasi terpadu antara eksekutif dan legislatif ditandai dengan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi masyarakat. |
| | | | 2 Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat. | |
| | | | 3 Membangun tata kerja dan hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif berdasarkan prinsip kemitraan | |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--|--|--|
| 3 | Hukum | <p>1 Penegakkan Supermasi Hukum</p> <p>2 Sosialisasi dan Bantuan Hukum</p> | <p>sesuai dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung sebagaimana mestinya.</p> <p>4 Menyelenggarakan pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL.</p> <p>1 Menyusun dan menyempurnakan produk, sistem, dan prosedur sarana dan prasarana hukum.</p> <p>2 Melaksanakan penyidikan dan pengenaan sanksi secara nyata dan transparan bagi pelanggar perda secara konsisten dan konsekuen oleh PPNS.</p> <p>3 Melaksanakan koordinasi antar penegak hukum.</p> <p>1 Melaksanakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat.</p> <p>2 Memberikan fasilitas bantuan hukum baik bagi masyarakat maupun aparatur secara adil.</p> | <p>– Meningkatnya supremasi hukum, antara lain melalui penyelesaian kasus-kasus hukum secara adil dan terintegrasi antara penegak hukum dengan ditunjang moral yang baik dan ditunjang penyediaan produk hukum.</p> <p>– Semakin kondusifnya kondisi hukum ditandai dengan berkurangnya kasus kasus penyimpangan hukum dan HAM, baik di sisi aparatur maupun masyarakat pada tahun 2005.</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Keamanan dan Ketertiban | <p>1 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban</p> | <p>1 Mendukung peningkatan pengendalian dan pengawasan bagi keberhasilan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>1 Mengembangkan sistem keamanan terpadu di masyarakat untuk mengantisipasi ancaman gangguan, hambatan dan tantangan bagi kehidupan masyarakat.</p> | <p>– Meningkatnya kerjasama antar petugas keamanan, yaitu antara aparat Badan Tramtibda, Bagian Hukum dengan Kepolisian serta meningkatnya kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan sistem Hankamnas (Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta)</p> <p>– Meningkatnya aktivitas keamanan terpadu masyarakat, antara lain dengan bertambahnya anggota Linmas (rakyat terdaftar dalam kurun waktu 2002-2005 dari 221.276/orang menjadi 243.8882 orang dan terdapat peningkatan 10 orang per desa per tahun, serta tercapainya peningkatan Sumber Linmas agar terampil terutama dalam penanggulangan bencana.</p> |
| 5 | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang | 1 Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan | <p>1 Melakukan upaya pemulihan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara.</p> <p>2 Mengembangkan pelestarian dan pendayagunaan keragaman hayati.</p> <p>3 Mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan pemulihan dan penanggulangan hutan.</p> <p>4 Melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.</p> | <p>– Terdeteksinya kualitas limbah tiap tahun 200 sampel, kualitas sungai/sumur 100 sampai udara 43 sampel, kualitas tanah 25 sampel dan B3 5 sampel agar tingkat pencemaran lingkungan terkendali.</p> <p>– Tersedianya Juklak dan Juknis pengendali lingkungan hidup.</p> <p>– Terlatihnya aparat BPLH AMDAL A, B, C, untuk setiap jenis keahlian sebanyak orang/tahun.</p> <p>– Tersedianya data yang yang bidang keanekaragaman hayati, tata air, waduk, situ, danau dan DPS.</p> <p>– Terbinanya masyarakat pelestari keanekaragaman</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|---|--|--|
| | | 2 Peningkatan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan | 1 Pencegahan, pengendalian, pemulihan pencemaran air, udara dan tanah. | <p>hayati dan sumber air.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbinanya masyarakat pelestari lahan kehutanan dan perkebunan. - Tersedianya Juklak/Juknis bidang pengelolaan lahan dan hutan dalam rangka menurunkan jumlah lahan kritis. - Tersedianya data yang akurat mengenai kawasan cagar budaya dan plasma nutfah kerusakan lahan dan hutan. - Terlaksananya kegiatan kerjasama pelestarian lahan dan hutan dengan LSM Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. - Terlaksananya rehabilitasi lahan-lahan kritis dan konservasi lahan. - Tersedianya sistem informasi lingkungan yang tepat dan akurat agar tingkat pencemaran lingkungan terkendali. - Terlaksananya pelatihan/ sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat. - Meningkatnya pemakaian bahan bakar beban timbal. - Diterapkannya hasil kajian dan peraturan pengendalian pencemaran air, tanah, udara dan B3 oleh masyarakat dan dunia usaha. - Terlaksananya studi kelayakan Pembangunan IPAL Terpadu pada 2 lokasi, yaitu Majalaya, dan Batujajar. |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|------------|---------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2 Melaksanakan intensifikasi dan Ekstensiifikasi pelaksanaan AMDAL, UPL dan UKL. | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman teknis dan Petunjuk Operasional untuk penilaian ANDAL, RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL untuk 14 sektor pengelolaan lingkungan hidup agar Kualitas dan keserasian lingkungan meningkat. - Dapat melaksanakan penilaian AMDAL, RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL dengan baik sesuai standar lingkungan untuk UKL-UPL dan SPPL. - Terlaksananya pemantauan/monitoring AMDAL, RKL-BPL, UKL.UPL dan SPPL, sehingga perubahan kepemilikan dan kegiatan udara dapat terdeteksi. |
| | | | 3 Melaksanakan penegakkan hukum lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Terlatihnya PPNS Lingkungan hidup 8 orang. - Menurunnya kasus-kasus pelanggaran pencemaran lingkungan. - Terlatihnya pengawas lingkungan hidup 8 orang. - Terlaksananya penanganan kasus-kasus pencemaran lingkungan. |
| | | 3 Pendayagunaan dan pengelolaan limbah. | 1 Mengembangkan Infrastruktur TPA. | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dan tertatanya lahan TPA yang dapat menampung volume sampah terbangun dengan sistem control land fill di TPA yang tersedia. |
| | | | 2 Mengembangkan sistem pengelolaan DCC (Decentralized Composting Concept) dan ZWS (Zero Waste System) dan pemanfaatan limbah. | <ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan TPA. - Terlaksananya pengelolaan sampah terpadu melalui composting dan daur ulang |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|------------------|--|---|
| | | | 3 Mengembangkan sistem pelayanan persampahan/limbah dalam rangka memelihara kebersihan lingkungan. | sampah. – Bertambahnya jumlah cakupan pelayanan persampahan/limbah cair dengan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang memadai. – Tersedianya tempat pengolahan limbah industri dan limbah tinja di IPA/IPLT yang tersedia. |
| | | | 4 Pembinaan dan Sosialisasi peraturan pendayagunaan dan pengelolaan limbah. | – Terlaksananya pembinaan dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah/limbah industri. |
| | | 4 Penataan Ruang | 1 Penataan Ruang. | – Tersedianya dokumen rencana tata ruang di 8 kawasan perkotaan untuk optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkesinambungan. |
| | | | 2 Pengembangan sistem informasi geografis perencanaan tata ruang. | – Meningkatnya kualitas penataan ruang dengan tersediannya SIG (sistem informasi geografis) berupa peta manual dan digital yang berbasis data serta peta digital seluas 80.000 Ha dan peta garis (IFU) seluas 87.865 Ha. |
| | | | 3 Penataan Bangunan. | – Tersedianya dokumen BTBL dan PBS di 6 (enam) lokasi sehingga mewujudkan tertib bangunan dan lingkungan. – Tersedianya dokumen laporan analisa harga satuan bangunan untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya pembangunan. |
| | | | 4 Peningkatan pengendalian tata | – Terwujudnya ketertiban dan keteraturan bangunan dan |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Pendidikan | 1 Peningkatan pelayanan pendidikan | <p>bangunan dan lingkungan.</p> <p>5 Pengembangan manajemen pertanahan.</p> <p>1 Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta penggabungan (regrouping) agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah dengan dukungan yang memadai.</p> <p>2 Melaksanakan pemerataan dan penambahan penyediaan guru.</p> <p>3 Meningkatkan kemampuan profesionalitas dan kesejahteraan guru.</p> <p>4 Mengembangkan sistem pendidikan terpadu.</p> <p>5 Menyelenggarakan alternatif pelayanan pendidikan dasar dan menengah untuk kelompok masyarakat miskin diperkotaan maupun pedesaan.</p> <p>6 Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi</p> | <p>lingkungan di 11 wilayah.</p> <p>– Meningkatnya konsistensi kesesuaian tanah dengan kemampuan tanah di 46 kecamatan.</p> <p>– Meningkatnya cakupan pelayanan pendidikan dengan meningkatnya NER (Net Enrollment Ratio) atau Angka Partisipasi Murni (APM) SD tahun 2001 dari 64,33% menjadi 94,87% pada 2005, APM SLTP dari 51,59% menjadi 81,03% APM SLTA dari 26,29% menjadi 44,31%; GER atau Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dari 71,57% menjadi 105,51% APK SLTP dari 68,20% menjadi 82,84% APK SLTA dari 37,04% menjadi 69,92%. Serta meningkatnya jumlah siswa lulusan SMK dan SMU yang dapat mempefoleh pekerjaan melalui kerjasama dengan dunia usaha. Meningkatnya minat baca ditandai dengan bertambahnya dan berkembangnya perpustakaan kabupaten, kecamatan dan desa dengan target tahun 2005 semua kecamatan (43 kec) memiliki perpustakaan serta 150 desa memiliki perpustakaan.</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|--------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>dan/atau keluarga tidak mampu.</p> <p>7 Meningkatkan program-program keterampilan / kejuruan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan lingkungan setempat ataupun sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dan muatan lokal (mulok).</p> <p>8 Mendorong pendidikan agama secara luas</p> <p>9 Mendorong masyarakat untuk tamat sekolah sampai dengan SLTA</p> | |
| | | 2 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan | <p>1 Mengembangkan lembaga kemasyarakatan pengelola santunan pendidikan yang terbuka dan akuntabel.</p> <p>2 Mendorong masyarakat swasta untuk menyediakan/melaksanakan pendidikan secara mandiri dan berkualitas.</p> <p>3 Mendorong terwujudnya sekolah-sekolah unggulan</p> | <p>– Terselenggaranya pemberian beasiswa yang berasal dan dikelola masyarakat; penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat yang berkualitas; serta terdapatnya sekolah unggulan.</p> |
| | | 3 Wajar Dikdas Tahun | 9 1 Mempercepat penuntasan buta | <p>– Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Dikdas dari 7,16</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|--------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>aksara, buta bahasa nasional dan buta pengetahuan dasar untuk warga belajar usia 10 s/d 44 tahun, maupun yang putus sekolah dari berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan</p> <p>2 Melaksanakan layanan pendidikan melalui belajar paket A, B, C serta jenis-jenis layanan pendidikan lainnya yang berorientasi Pada Potensi dan kondisi lingkungan setempat.</p> | <p>tahun pada tahun 2000 menjadi 8,07 tahun pada tahun 2005. Meningkatnya AMH (Angka Melek Huruf) dari 95,50% tahun 2000 menjadi 99,30% pada tahun 2005 yang akan dibantu melalui penyelenggaraan Paket layanan pendidikan luar sekolah yang direncanakan akan dilaksanakan sampai tahun 2005 adalah Paket A 464 kelompok; B 248 kelompok; C 40 kelompok.</p> |
| | | 4 Peningkatan dan pembinaan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah dan Kejuruan | <p>1 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LLS (Latihan Luar Sekolah) dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja)</p> <p>2 Mendorong terwujudnya sekolah kejuruan di daerah yang berorientasi potensi lokal dan peluang pasar kerja.</p> <p>3 Mendorong pemberdayaan sekolah/ lembaga pendidikan keagamaan (pesantren dll) dalam pengembangan keterampilan dan keahlian kerja</p> | <p>– Meningkatnya kualitas pendidikan kejuruan, pesantren (lembaga pendidikan keagamaan) dan kualitas pendidikan luar sekolah sehingga lulusannya mampu bekerja secara terampil, ditunjang oleh berdirinya 4 sekolah kejuruan di 4 kecamatan yaitu Pangalengan dan Lembang untuk pertanian; Majalaya untuk teknik dan Soreang untuk pariwisata.</p> |
| | | 5 Pengembangan | 1 Mendorong | – Meningkatnya jumlah |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|-----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Kesehatan | pendidikan anak dini usia (PADU). 1 Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat | tumbuhnya prasekolah bagi anak-anak dini usia (kelompok bermain/play group dan taman kanak-kanak). 1 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, serta sarana pendukung kesehatan lainnya. 2 Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan atau dana jaminan kesehatan. 3 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan obat esensial beserta alat kesehatan lainnya di setiap fasilitas kesehatan, dasar dan kesehatan rujukan sesuai kebutuhan. 4 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan. 5 Meningkatkan informasi manajemen kesehatan. 6 Peningkatan kualitas pelayanan bagi pemegang Kartu ASKES dan Kartu Sehat (KS) | partisipasi dan lembaga pendidikan anak dini usia. – Meningkatnya contact rate Puskesmas terhadap penduduk dari 49,34% pada tahun 2000 menjadi 55% pada tahun 2005. Menurunnya angka kematian bayi dari 43 per 1.000 pada tahun 2000 menjadi 37,13 pada tahun 2005, Meningkatnya angka harapan hidup dari 68,37 tahun pada tahun 2000 menjadi 72,49 tahun pada tahun 2005 RSUD dari 4 buah, pada tahun 2005 2 buah telah terakreditasi (5 program), memanfaatkan pemanfaatan tempat tidur operasi/Bed Operation Rate (BOR) dari 65 % pada tahun 2000 menjadi 70% pada tahun 2005. – Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta ASKES dan Kartu Sehat. |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|------------|---------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2 Peningkatan Budaya Hidup Bersih, Sehat dan Berkualitas | <p>1 Melaksanakan pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>2 Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan media penyuluhan.</p> | <p>– Meningkatnya Desa Sehat dengan klasifikasi IV menjadi 60% pada tahun 2005.</p> <p>– Meningkatnya Institusi Pendidikan dengan klasifikasi sehat IV menjadi 84% pada tahun 2005, Institusi Kesehatan Sehat dengan klasifikasi IV menjadi 80% pada tahun 2005.</p> |
| | | 3 Penanggulangan penyakit | <p>1 Melaksanakan pencegahan penyakit melalui imunisasi.</p> <p>2 Melaksanakan Pengamatan Penyakit dengan mengembangkan dan meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD).</p> <p>3 Melaksanakan pencegahan dan pembelantasan Penyakit Tuberkolose (TBC).</p> <p>4 Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA)</p> <p>5 Melaksanakan Pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam berdarah.</p> <p>6 Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Rabies.</p> | <p>– Meningkatnya prosentase UCI (Universal Child Imunitation) Desa dari 85% pada tahun 2000 menjadi 90% pada tahun 2005.</p> <p>– Menurunnya angka kejadian Luar Biasa Penyakit.</p> <p>– Meningkatnya angka kesembuhan penyakit TBC dari 82% pada tahun 2000 menjadi > 85% pada tahun 2005</p> <p>– Menurunnya angka kesakitan Pnemonia 15% pada tahun 2000 menjadi 12% pada tahun 2005, Angka kematian Pnemonia pada balita dari 5 per 1.000 pada tahun 2000 menjadi 3 per 1.000 pada tahun 2005.</p> <p>– Menurunnya angka kesakitan DBD dari 7,6 per 100.000 penduduk Pada tahun 2000 menjadi kurang dari 5 per 100.000 penduduk.</p> <p>– Menurunnya kasus gigitan dari 5,75 per 100.000 penduduk pada tahun 2000 menjadi 5 per</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|--------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 100.000 penduduk pada tahun 2005. |
| | | | 7 Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit Pes. | – Angka kesakitan Pes 0% Pada tahun 2000 menjadi 0 % pada tahun 2005. |
| | | | 8 Melaksanakan pemberantasan dan penanggulangan penyakit Kusta. | – Menurunnya prevalensi penyakit kusta dari 0,27 per 10.000 penduduk Pada tahun 2000 menjadi 0,15 Per 10.000 penduduk pada tahun 2005. |
| | | | 9 Melaksanakan Pemberantasan dan penanggulangan penyakit Kelamin. | – Menurunnya prevalensi HIV dari 0.9 per 1.000 penduduk pada tahun 2000 menjadi 0,7 per 1.000 pada tahun 2005. |
| | | | 10 Melaksanakan Pemberantasan dan penanggulangan Penyakit Diare. | – Menurunnya angka kematian diare pada balita dari 8,29 per 1.000 pada tahun 2000 menjadi 6,25 per 1.000 pada tahun 2005. |
| | | 4 Perbaikan Gizi | 1 Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat. | – Menurunnya prevalensi KEP pada balita dari 14% pada tahun 2000 menjadi 10 % pada tahun 2005. Menurunnya kasus gizi Iebih dari 5,2% pada tahun 2000 menjadi di bawah 5% pada tahun 2005. |
| | | | 2 Menanggulangi gizi kurang dan kejadian gizi buruk. | – Meningkatnya cakupan vitamin A pada balita dari 65,8% pada tahun 2000 menjadi 90% pada tahun 2005, meningkatnya keluarga yang mengkonsumsi garam beridium dari 57,6% pada tahun 2000 menjadi 90% pada tahun 2005. |
| | | | 3 Menanggulangi GAKY, anemia, Vit A, dll. | |
| | | | 4 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberian ASI. | |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--|---|--|
| | | 5 Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Reproduksi | 1 Mengatasi tingginya AKI, AKB, AKABA, BBLR. | – Menurunnya angka kematian bayi dari 43 per 1.000 pada tahun 2000 menjadi 37,43 per 1.000 pada tahun 2005. Menurunnya prevalensi BBLR dari 1,77% pada tahun 2000 menjadi di bawah 1,5 % pada tahun 2005 Meningkatnya Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 68,10% pada tahun 2000 menjadi 75% pada tahun 2005. |
| | | 6 Pembinaan pengawasan dan pengendalian Obat-obatan, makanan, minuman, peralatan kesehatan serta Kosmetika | <p>1 Merencanakan kebutuhan dan pengadaan obat-obatan serta peralatan kesehatan.</p> <p>2 Melaksanakan pemberdayaan, pengawasan sarana produksi dan distribusi obat-obatan serta perbekalan farmasi lainnya.</p> <p>3 Melaksanakan pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan obat, nafza dan sejenisnya.</p> <p>4 Mengamati dan menarik dari peredaran produk obat termasuk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>5 Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan cara produksi makanan, minuman (mamin) yang baik aman, bermutu pada</p> | <p>– Pada tahun 2005, setiap Puskesmas memiliki ketersediaan obat dan peralatan kesehatan yang memadai. Penggunaan obat yang tidak rasional menurun dari 38,52% pada tahun 2001 menjadi di bawah 20% pada tahun 2005.</p> <p>– Menurunnya kasus kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan dari 3 kali Pada tahun 2000 menjadi 0 pada tahun 2005.</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|---------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | industri mamin. | |
| | | | 6 Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan cara produksi yang baik aman, dan bermutu pada industri kosmetik dan alat kesehatan. | – Meningkatnya penggunaan obat sesuai standar. |
| | | 7 Kesehatan Lingkungan | 1 Menyediakan, memperbaiki sarana air bersih baik kualitas maupun kuantitas dan sanitasi dasar lingkungan lainnya diperkotaan dan di pedesaan. | – Meningkatnya cakupan air bersih dari 70,5% pada tahun 2000 menjadi 75% pada tahun 2005; Mengkaji cakupan penduduk yang menggunakan jamban keluarga dari 45,08 % menjadi 55% pada tahun 2005; Meningkatkan Penduduk yang menggunakan SPAL dari 35,87% pada tahun 2000 menjadi 50% Pada tahun 2005. |
| | | | 2 Meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi syarat kesehatan. | – Meningkatnya sarana dan Prasarana lingkungan perumahan dan permukiman baik kualitas rnaupun kuantilas serta pasca bencana alam. – Tertanggulangnya perbaikan sistem drainase perkotaan. |
| 8 | Sosial Budaya | 1 Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Transmigrasi | 1 Mengembangkan sistem Informasi dan manajemen kependudukan. 2 Melaksanakan pengendalian penduduk melalui inslitusi di tingkal kabupaten hingga desa melalui kegiatan administrasi. | – Meningkalnya pelayanan kependudukan menjadi lebih cepat, mudah dan yang. Terkendalinya penduduk melalui administrasi penyebaran kependudukan dan transmigrasi. |
| | | 2 Pemberdayaan Generasi Muda dan Olahraga | 1 Pemberdayaan kemasyarakatan pemuda. | – Meningkatnya aktivitas, kemandirian dan kebugaran pemuda melalui organisasi |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | <p>2 Memantapkan peran dan fungsi wadah berhimpun organisasi pemuda.</p> <p>3 Mendorong pembentukail kelompok wirausaha Tim Kerja Pemuda Mandiri (TKPM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).</p> <p>4 Melakukan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olah raga yang menjadi unggulan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan.</p> | <p>kemasyarakatan kepemudaan dan organisasi keolahragaan.</p> <p>– Meningkatnya aktivitas kemandirian dan kebugaran pemuda dengan terbentuknya TKPM dan KUBE.</p> <p>– Meningkatnya prestasi olah raga dan terbangunnya sarana dan prasarana olah raga di desa-desa.</p> |
| | | 3 Pengembangan Seni dan Budaya Daerah | <p>1 Menanamkan nilai budaya dan seni daerah kepada generasi muda anbra lain melalui kegiatan pertukaran pemuda, pasangiri kesenian dan lain-lain.</p> <p>2 Mengembangkan serta memberikan pengkayaan kesenian dan kebudayaan tradisional lokal sebagai produk wisata daerah.</p> | <p>– Meningkatnya animo pemuda terhadap seni budaya daerah, antara lain melalui peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan seni budaya, dan keikutsertaan dalam pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BCB).</p> <p>– Berkembangnya aklifitas kegiatan seni dan budaya tradisional lokal di kabupaten Bandung.</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|-----------------------------------|--|--|
| | | 4 Rehabilitasi dan bantuan sosial | <p>3 Mengembangkan sarana dan prasarana pusat seni dan budaya daerah.</p> <p>1 Memberikan santunan dan bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban masalah-masalah sosial lainnya.</p> <p>2 Melakukan penyuluhan dan atau gerakan kepedulian sosial kepada dunia usaha dan kelompok masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dalam membantu korban bencana alam, korban kerusuhan, dan korban masalah-masalah sosial lainnya.</p> <p>3 Meningkatkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan NAPZA serta membantu aparat penegak hukum dalam menghambat penyebarluasan NAPZA.</p> <p>4 Melakukan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban masalah-</p> | <p>– Meningkatnya aktivitas kegiatan seni dan budaya daerah di Kabupaten Bandung melalui organisasi seni dan situs (BCB) serta pembangunan gedung kesenian.</p> <p>– Tertanggulangi dan terbantunya sebagian besar dari 24 (dua puluh empat) penyandang masalah-masalah sosial pada tahun 2000 seperti anak terlantar, penyandang cacat, keluarga miskin, korban bencana alam, korban kerusuhan, korban penyalahgunaan NAPZA, WTS, GPOT (Gelandangan, Pengemis, Orang terlantar dan diantaranya dengan memperoleh pelatihan dan bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-----------------|--|--|--|
| 9 | ketenagakerjaan | <p>1 Pemberdayaan Ketenagakerjaan.</p> <p>2 Perlindungan Ketenagakerjaan</p> | <p>masalah sosial lainnya.</p> <p>5 Memberdayakan sumber/potensi petugas kesejahteraan sosial.</p> <p>6 Mengembangkan sarana dan prasarana bagi pemberantasan dan pemulihan penyakit masyarakat.</p> <p>1 Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.</p> <p>2 Melaksanakan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja mandiri bagi wirausaha sektor informal.</p> <p>3 Mendorong peningkatan peran asosiasi tenaga kerja dalam penyaluran tenaga kerja.</p> <p>1 Melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban pekerja.</p> <p>2 Menentukan upah minimum regional (UMR) sesuai dengan sistem dan mekanisme pengupahan di Kabupaten.</p> | <p>– Tertampungnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Panti Persinggahan dan Panti-panti lainnya.</p> <p>– Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor usaha pada tahun 2005, dapat dilihat melalui penurunan Pengangguran sebesar 6,33 % dari jumlah Penduduk Kabupaten Bandung serta bertambahnya wirausaha sektor informal sebanyak 2.205 orang.</p> <p>– Berkurangnya kasus-kasus unjuk rasa pada 1.860 perusahaan dan meningkatnya kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bandung serta meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|---|--|---|
| 10 | Agama | <p>1 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat</p> <p>2 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama</p> | <p>3 Mengembangkan peningkatan hubungan industrial Pancasila.</p> <p>1 Mendorong lembaga dakwah dan organisasi keagamaan dalam pembinaan secara langsung berupa penyuluhan dan pendidikan secara terpadu kepada masyarakat dan aparatur.</p> <p>2 Mendorong lembaga/institusi terkait dalam pembinaan secara tidak langsung kepada masyarakat dan aparatur melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik.</p> <p>3 Meningkatkan peran lembaga pendidikan keagamaan dalam mengemban misi dakwah dan pendidikan agama bagi umatnya.</p> <p>1 Memberikan bantuan stimulasi untuk pembangunan dan rehabilitasi peribadatan serta tempat kegiatan peribadatan lainnya.</p> <p>2 Meningkatkan mutu pelayanan keagamaan dan bimbingan haji serta perlindungan</p> | <p>– Meningkatnya penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>– Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana keagamaan; Meningkatnya komunikasi keagamaan antar stakeholder; Meningkatnya aktivitas keagamaan; Meningkatnya peran dan fungsi lembaga pengelola zakat.</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | jemaah haji. | |
| | | | 3 Memberikan bantuan stimulan dan menyediakan sarana dan prasarana bantuan berupa peralatan dan buku pelajaran bagi lembaga pendidikan keagamaan maupun lembaga sosial keagamaan. | |
| | | 3 Peningkatan Kerukunan Beragama. | 1 Membina kerukunan antar umat beragama. | – Hilangnya konflik SARA dan meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan. |
| | | | 2 Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan kerukunan hidup beragama di tengah tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk. | |
| | | 4 Pengembangan Sarana dan prasarana Agama. | 1 Mendorong tumbuhnya sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. | – Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan keagamaan di masyarakat. |
| 11 | Pembangunan Wilayah. | 1 Pengembangan kawasan Andalan dan Kota Baru. | 1 Penyamaan persepsi tentang pengertian, pengaturan dan pengelolaan kawasan andalan/tertentu dan kota baru oleh seluruh stakeholders. | – Terbentuknya Kota Baru Tegalluar dan berkembangnya kawasan andalan sesuai dengan rencana. |
| | | | 2 Pembentukan badan pengelola kawasan tertentu/andalan dan kota baru. | |
| | | | 3 Penyusunan dokumen | |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--|--|---|
| | | 2 Pengembangan Jaringan Prasarana Dasar Wilayah. | <p>perencanaan detail dan teknis kawasan andalan tertentu dan kota baru.</p> <p>1 Pembangunan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penerapan status dan fungsi jalan.</p> <p>2 Penyiapan rencana pembangunan jalan bebas hambatan/Tol.</p> <p>3 Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p> <p>4 Pengembangan sistem pelayanan angkutan umum.</p> <p>5 Pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan dan bangunan irigasi.</p> | <p>– Meningkatnya ruas-ruas jalan dan status jalan secara mantap sehingga dapat mewujudkan aksesibilitas dan mobilitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat.</p> <p>– Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Pasirkoja-Soreang dan Gedebage-Majalaya.</p> <p>– Terciptanya ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bandung.</p> <p>– Terciptanya jaringan lintas angkutan barang dan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung.</p> <p>– Terpenuhinya kebutuhan shelter, pagar, kantor, landasan dan fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>– Terairinya areal sawah irigasi teknis, setengah teknis dan pedesaan.</p> <p>– Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir anak sungai Citarum, dan perencanaan waduk pada anak sungai Citarum.</p> |
| | | 3 Pengembangan Utilitas Umum | 1 Menyediakan lahan bagi pemakaman umum. | <p>– Sinergi pelayanan TPU/TPBU kota.</p> <p>– Meningkatnya PADS dari hasil pungutan Retribusi ijin pemakaman.</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Pengelolaan Sumber Daya Alam. | 1 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. | <p>2 Memelihara keindahan kota melalui penataan perkotaan, lingkungan dan pertamanan.</p> <p>1 Pengelolaan/konservasi sumber daya air dan pengendalian banjir.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi pelayanan RTH dan taman. - Sampai dengan tahun 2005 terjadi peningkatan kapasitas paru-paru kota di 30 lokasi. - - Terjaganya anak sungai Citarum dari erosi dan degradasi sungai. - Tersedianya neraca air baku di 4 wilayah (Bandung Barat, Timur, Utara dan Bandung Selatan) untuk memudahkan penilaian potensi Wilayah dan meningkatkan pelayanan air bersih. - Berkurangnya luas genangan banjir pada anak sungai Citarum melalui normalisasi sungai. - Meningkatnya fungsi penampungan air di lokasi Situ Ciburuy dan embung Kali Ciwidey dan embung Kali Citarum dalam memenuhi kebutuhan air dan pariwisata. - Terbinanya kemampuan P3A Mitra Cai sebanyak 60 kelompok pertahun. |
| | | 2 Pengembangan pertanian | 1 Pengembangan dan Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian terutama bibit/benih berkualitas. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya produktivitas, kualitas & produksi komoditas pertanian tanaman pangan & hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan untuk meningkatkan nilai tambah pendapatan petani; kemudian adanya peningkatan investasi dalam |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--------------|--|--|
| | | | <p>2 Pemberdayaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di sektor Pertanian.</p> <p>3 Melakukan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pembangunan pertanian.</p> <p>4 Mengembangkan teknologi tepat guna usaha tani spesifik lokasi yang ramah lingkungan.</p> | <p>bid. pertanian, perluasan kesempatan kerja serta meningkatnya kegiatan usaha agribisnis di pedesaan; Proyeksi produksi padi sawah pd thn 2005 sebesar 504.572 ton dari produksi thn 2001 sebesar 477.227 ton, kentang thn 2005 sebesar 353.438 ton dari produksi thn 2001 sebesar 309.038 ton. Proyeksi produksi daging pd tahun 2005 sebesar 26.084 ton dari produksi pd thn 2001 sebesar 18.186 ton, Susu pada thn 2005 sebesar 93.851 ton dari produksi thn 2001 sebesar 85.004 ton, Telur pd thn 2005 sebesar 8.521 ton dari produksi thn 2001 sebesar 5.789 lor serta produksi ikan pd thn 2005 sebesar 29.072 ton dari produksi pd thn 2001 sebesar 21.560 ton selanjutnya adanya proyeksi peningkatan komoditas unggulan perkebunan dari 2.500 ton thn 2005, sedangkan produksi HR (kayu-kayuan) pd thn 2001 sebesar 33.000 m3 rnenjadi 40.000 m3 pd thn 2005.</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--|--|--|
| | | | <p>5 Mengembangkan sentra-sentra komoditas unggulan pada kawasan andalan.</p> <p>6 Mengembangkan ketahanan pangan melalui, pengembangan agribisnis komoditas berbasis pangan dan non pangan.</p> <p>7 Mengembangkan model perencanaan pengembangan agribisnis terpadu pada berbagai wilayah.</p> <p>8 Mengembangkan kemitraan usaha pertanian berorientasi agribisnis, agroindustri pada sub sistem hulu, budidaya dan hilir secara terpadu.</p> <p>9 Mengembangkan sistem informasi dan promosi agribisnis.</p> | |
| | | 3 Pengelolaan Pertambangan dan Energi. | 1 Melaksanakan penelitian bagi pengembangan potensi usaha pertambangan dan energi. | <p>– Tumbuhnya kegiatan usaha dalam pemanfaatan potensi pertambangan dan energi daerah secara optimal dan berwawasan lingkungan melalui data hasil studi kelayakan, eksplorasi dan teknologi pengolahan hasil produksi serta menurunnya jumlah angka pelanggaran dalam kegiatan usaha Penambangan pengambilan air bawah tanah dan pemanfaatan energi melalui peningkatan</p> |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|---------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2 Melakukan penertiban usaha pertambangan dan energi yang mengganggu keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta melanggar ketentuan yang berlaku. | pengawasan dan pengendalian (Wasdal). |
| | | 4 Pengembangan Kepariwisata. | 1 Melaksanakan review dan penyempurnaan RIPPDA. | – Meningkatnya jumlah wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Bandung melalui event-event pariwisata, yang didukung oleh peningkatan daya tarik obyek-obyek wisata yang ada. |
| | | | 2 Melakukan penataan obyek wisata/daerah tujuan wisata (DTW) baik infrastruktur maupun kegiatan pendukung lainnya. | – Meningkatnya pelayanan pariwisata dan daya tarik obyek wisata terhadap Wisman dan Wisnus. |
| | | | 3 Peningkatan promosi dan pengembangan pariwisata daerah, melalui penyusunan profil kepariwisataan daerah maupun media lainnya. | – Meningkatnya minat wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bandung, kontribusi terhadap PAD dan pemberdayaan pada masyarakat. |
| | | | 4 Peningkatan pelayanan usaha jasa pariwisata. | – Meningkatnya mutu dan kualitas penyediaan sarana dan usaha jasa pariwisata, meningkatnya pendapatan masyarakat. |
| 13 | Ekonomi | 1 Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan- | 1 Mengembangkan inkubator-inkubator bisnis di pedesaan. | – Berkembangnya kegiatan usaha masyarakat di pedesaan melalui pembentukan inkubator bisnis baru sebanyak 172 buah dan terlaksananya pemberdayaan bagi 17.000 |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|---|---|--|
| | | | <p>2 Mendorong kegiatan usaha ekonomi produksi di pedesaan.</p> <p>3 Mengadakan forum bisnis dan klinik konsultasi bisnis di pedesaan.</p> <p>4 Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan di pedesaan (BMT, Kopontren, PD BPR dan Koperasi dan lembaga keuangan mikro.</p> | <p>pengusaha mikro produktif yang tersebar disetiap kecamatan dan pemecahan masalah usaha di pedesaan melalui klinik konsultasi usaha bagi 1.019 pengusaha mikro produktif dipedesaan.</p> <p>– Terwujudnya penguatan modal bagi 862 kelompok melalui stimulasi dana bergulir dengan pemanfaatan lembaga keuangan daerah/desa seperti PD, PBR, UEO-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebagai chanelling, dan terlaksananya penerapan pola syariah.</p> |
| | | 2 Pengembangan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). | 1 Melaksanakan diklat manajemen bagi pengelola koperasi dan UKM. | – Berkembangnya 1.280 Koperasi dan 1.136 UKM di Kabupaten Bandung melalui perwujudan klasifikasi Koperasi Kelas A sebesar 300 unit koperasi, Kelas B 480 unit koperasi & Kelas C 500 unit koperasi, serta Pengusaha Kecil Tangguh 400 unit, Pengusaha Kecil Mandiri 75 unit dan Calon Pengusaha Menengah sebesar |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | | 3 Pengembangan Industri Manufaktur. | <p>2 Memberikan bantuan modal dan fasilitas permodalan bagi pengembangan Koperasi dan UKM,</p> <p>3 Meningkatkan dan memberdayakan koperasi ssbagai lembaga/sarana distribusi barang dan jasa produksi masyarakat.</p> <p>4 Mengembangkan pemberdayaan potensi masyarakat sebagai pelaku ekonomi di daerah melalui Koperasi dan UKM.</p> <p>5 Mendorong perwujudan koperasi sebagai sokoguru perekonomian.</p> <p>1 Menyusun perencanaan secara terpadu bagi pengembangan industri manufaktur yang berwawasan lingkungan.</p> <p>2 Mensosialisasikan SNI/Gugus</p> | <p>25 unit.</p> <p>– Terciptanya sentra-sentra kegiatan industri manufaktur baik kecil, menengah dan besar sesuai dengan tata ruang wilayah dan dampak lingkungan yang terkendali akibat kegiatan industri. Selanjutnya dalam 5 tahun mendatang diharapkan sebesar 600 pengusaha di Kabupaten Bandung telah memahami SNI/Gugus kendali mutu dan ISO 9000 bagi produk manufaktur dan 10 pengusaha industri telah menerapkan gugus kendali mutu.</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--|---|---|
| | | | <p>kendali mutu dan ISO 9000 bagi produk manufaktur.</p> <p>3 Mendorong penyediaan sarana dan prasarana bagi kegiatan industri kecil manufaktur.</p> <p>1 Membangun, merenovasi, meningkatkan status dan merelokasi sarana dan prasarana kegiatan perdagangan masyarakat baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta.</p> <p>2 Mengadakan dan menyiapkan sistem informasi pasar baik untuk pasar lokal, regional maupun internasional.</p> | <p>– Terlaksananya pemberian informasi dan konsultasi bagi pengusaha industri kecil (IK) manufaktur.</p> <p>– Meningkatnya kegiatan pembangunan/ renovasi pasar, penyediaan sarana kebersihan dan ketertiban di 28 unit pasar.</p> <p>– Terlaksananya kegiatan relokasi dan penyelesaian status tanah di 5 unit pasar.</p> <p>– Meningkatnya SDM Pengelola Pasar sebanyak 520 orang.</p> <p>– Meningkatnya PAD dari Pos Retribusi Pasar dan Perijinan lingkup perdagangan.</p> <p>– Tersedianya himpunan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri, buku profil eksportir, buku profil importir, profil komoditi unggulan dan buku inquiry buyers.</p> <p>– Meningkatnya arus distribusi barang dan produksi barang di pasar lokal, regional dan internasional.</p> <p>– Meningkatnya partisipasi pengusaha dalam mengikuti pameran dagang di dalam dan di luar negeri.</p> <p>– Meningkatnya pemahaman teknis perdagangan luar negeri bagi 600 pengusaha eksportir maupun 600 calon eksportir.</p> |
| | | 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan | | |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|-----|--------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 3 Memonitor dan mengevaluasi arus barang dan jasa di daerah. | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data distributor/agen dan prognosa kebutuhan masyarakat mengenai barang pokok dan barang strategis. - Meningkatnya pemahaman UU no. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. - Tersedianya SDM kemetrologian sebanyak 15 orang dan sarana pendukung dan perlengkapannya. - Tercapainya pemahaman atas hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat konsumen serta terkendalinya arus barang yang diawasi melalui perijinan yang diberikan. - Tercapainya kemampuan teknis aparat pelaksana dan organisasi perlindungan konsumen. |
| | | 5 Peningkatan Promosi dan Investasi | <p>1 Merencanakan penyusunan kegiatan promosi dan investasi di daerah.</p> <p>2 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) kegiatan investasi baik PMA maupun PMDN di Kabupaten Bandung.</p> <p>3 Menawarkan peluang potensi daerah bagi kegiatan investasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kegiatan investasi di Daerah dari 460 menjadi 480 PMA dan PMDN pada tahun 2005, selain itu meningkatnya investasi dalam bidang kepariwisataan dan agribisnis sebagai kegiatan investasi non industri. - Meningkatkan kualitas pengelolaan PMA/PMDN oleh perusahaan serta memasyarakatkan potensi investasi daerah. |

| No. | BIDANG | PROGRAM | KEGIATAN STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN |
|------------|---------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6 Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah. | <p>PMA maupun PMDN.</p> <p>1 Menyusun sistem informasi pendapatan daerah.</p> <p>2 Penyusunan aspek legalitas (Peraturan) tentang sumber-sumber pendapatan.</p> <p>3 Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan PBB.</p> <p>4 Mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah dan barang daerah.</p> <p>5 Melakukan kemitraan dan penyertaan modal kepada BUMD, lembaga perbankan dan lembaga ekonomi lainnya.</p> <p>6 Mendorong lembaga perbankan daerah dengan sistem/pola syariah.</p> <p>7 Melakukan pengkajian dan</p> | <p>– Tersedianya sistem informasi pendapatan daerah yang akurat dan terintegrasi antara Dipenda, BAKD dan Pemegang Kas Daerah serta unit kerja terkait.</p> <p>– Terwujudnya tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.</p> <p>– Tersedianya peraturan sebagai dasar hukum pemungutan pendapatan daerah.</p> <p>– Meningkatnya penerimaan PAD dan PBB pada setiap tahunnya secara signifikan untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>– Terselenggaranya pembukuan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berpasangan serta terwujudnya efisiensi, efektivitas dan ekonomis penggunaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.</p> <p>– Bertambahnya modal/saham Pemuda Kabupaten Bandung untuk stabilitas dan kemandirian keuangan daerah, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pendapatan daerah dari hasil kemitraan.</p> <p>– Terlaksananya penerapan pola syariah pada lembaga perbankan daerah pada tahun 2003.</p> <p>– Tersusunnya standar kinerja, standar belanja untuk berbagai</p> |

| No. 1 | BIDANG 2 | PROGRAM 3 | KEGIATAN STRATEGIS 4 | INDIKATOR KEBERHASILAN 5 |
|----------|-------------|--------------|--|--|
| | | | <p>penerapan standar analisis belanja untuk berbagai jenis pengeluaran pemerintah daerah (mengembangkan anggaran kinerja).</p> <p>8 Melaksanakan administrasi keuangan daerah dengan baik dan tertib sesuai ketentuan.</p> <p>9 Melakukan inventarisasi penataan dan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah.</p> | <p>Jenis pengeluaran Pemda serta rningkatnya efisiensi dan efektivitas dan ekonomis penggunaan keuangan daerah.</p> <p>– Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>– Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.</p> |

BAB VI

PENUTUP

Semangat globalisasi dan desentralisasi melalui penerapan Otonomi Daerah menggiring pembangunan ke arah peningkatan kemandirian masyarakat dan juga kemandirian pemerintah. Demokrasisasi di segala bidang termasuk demokrasi ekonomi merupakan salah satu kewajiban dalam penerapan Otonomi Daerah dan diharapkan akan menjadi kekuatan besar dalam menciptakan perekonomian rakyat yang tangguh dan mandiri. Penguatan nilai-nilai religius, penerapan aspek kultural dan pembangunan berwawasan lingkungan akan menjadi sisi penyeimbang kegiatan pembangunan, sehingga akan diperoleh hasil-hasil pembangunan dan generasi baru pembangunan yang berkualitas. Sehat jasmani dan rohani, menjunjung tinggi kestabilan perdamaian melalui pemahaman agama yang mantap, serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan sebagai aset yang akan menjamin masa depan generasi yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi, sikap mental, semangat, kerja keras, keuletan, ketekunan, keteguhan prinsip, moral dan disiplin semua unsur dalam lapisan masyarakat. Walaupun demikian, manusia hanya memiliki rencana, Yang Maha Kuasa akan memastikan dan menentukan pelaksanaannya. Oleh karena itu semua upaya pembangunan daerah ini tetap harus diiringi do'a untuk mendapat ridla dan berkah-Nya.